



UNIVERSITAS MERCU BUANA
PROGRAM PASCASARJANA

TESIS

Wacana Feminisme Di Dunia Politik Dalam Teks Berita Majalah Figur
Dan Femina Edisi April 2010

Disusun Oleh

ACHMAD BUDIMAN SUDARSONO

Nim : 55209110048

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Konsentrasi Studi : Political and Media Industri

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2012



MERCU BUANA

LEMBAR PESRSETUJUAN SIDANG TESIS

1. Nama : Achmad Budiman Sudarsono
2. NIM : 55209110048
3. Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
4. Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
5. Konsentrasi : Media dan Komunikasi Politik
6. Judul : Konstruksi Ideologi Media Perempuan Berpolitik
(Wacana Feminisme Pemberitaan Kuota 30 Persen
Perempuan Berpolitik di Legislatif Pada Majalah Figur
dan Femina

Jakarta, April 2012

Pembimbing Utama

Dr. Henni Gusfa

Pembimbing II

Afdal Makkuraga, M.Si

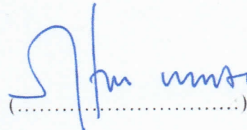
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS

1. Nama : Achmad Budiman Sudarsono
2. NIM : 55209110048
3. Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
4. Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
5. Konsentrasi : Media dan Komunikasi Politik
6. Judul : Konstruksi Ideologi Media Perempuan Berpolitik
(Wacana Feminisme Pemberitaan Kuota 30 Persen
Perempuan Berpolitik di Legislatif Pada Majalah Figur
dan Femina

Jakarta, April 2012

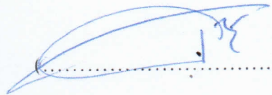
Mengetahui

1. Ketua Sidang
Heri Budianto, S.Sos. M.Si



(.....)

2. Penguji Ahli
Dr. Farid Hamid. M.Si



(.....)

3. Pembimbing Utama
Dr. Henni Gusfa



(.....)

4. Pembimbing II
Afdal Makkuraga. M.Si



(.....)

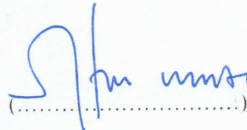
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS

1. Nama : Achmad Budiman Sudarsono
2. NIM : 55209110048
3. Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
4. Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
5. Konsentrasi : Media dan Komunikasi Politik
6. Judul : Konstruksi Ideologi Media Perempuan Berpolitik
(Wacana Feminisme Pemberitaan Kuota 30 Persen
Perempuan Berpolitik di Legislatif Pada Majalah Figur
dan Femina

Jakarta, April 2012

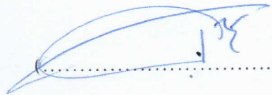
Mengetahui

1. Ketua Sidang
Heri Budianto, S.Sos. M.Si



(.....)

2. Penguji Ahli
Dr. Farid Hamid. M.Si



(.....)

3. Pembimbing Utama
Dr. Henni Gusfa



(.....)

4. Pembimbing II
Afdal Makkuraga. M.Si



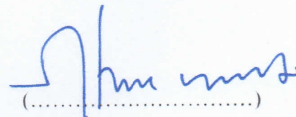
(.....)

LEMBAR TANDA LULUS SIDANG

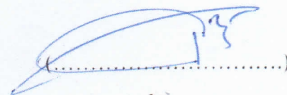
1. Nama : Achmad Budiman Sudarsono
2. NIM : 55209110048
3. Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
4. Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
5. Konsentrasi : Media dan Komunikasi Politik
6. Judul : Konstruksi Ideologi Media Perempuan Berpolitik
(Wacana Feminisme Pemberitaan Kuota 30 Persen
Perempuan Berpolitik di Legislatif Pada Majalah Figur
dan Femina

Jakarta, April 2012
Mengetahui

1. Ketua Sidang
Heri Budianto. S.Sos. M.Si


(.....)


2. Penguji Ahli
Dr. Farid Hamid. M.Si


(.....)

3. Pembimbing Utama
Dr. Henni Gusfa


(.....)

4. Pembimbing II
Afdal Makkuraga. M.Si


(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	xx
LEMBAR PERSETUJUAN	xx
LEMBAR PERNYATAAN	xx
ABSTRAKSI	xx
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka	17
2.2 Pemahaman Feminisme	22
2.2.1 Aliran Feminisme.....	23
2.2.1.1 Feminisme Libral	23
2.2.1.2 Feminisme Marxis-Sosialis	24

2.2.1.3 Feminisme Radikal	25
2.3 Perbedaan Sex dan Gender	26
2.4 Jurnalisme Perspektif Gender	29
2.5 Majalah dan Produksi Teks	35
2.6 Ekonomi Media Majalah Figur	38
2.7 Politik Pencitraan	41
2.8 Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian	46
3.2 Paradigma Penelitian	48
3.3 Metode Penelitian	50
3.4 Populasi dan Sampel	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data	53
3.6 Key Informasi	53

DAFTAR PUSTAKA	xx
Lampiran	xxx

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas ini. Adapun tugas ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah seminar pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.

Dalam proses penyusunan tugas ini tidak luput dari bantuan dan dorongan rekan-rekan instansi dan rekan-rekan kampus yang ikut berpartisipasi atas segala materi/bahan yang penulis cari dan peroleh selama ini. Sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Bpak Ir. Dana Santosa Meng Sc. Phd
2. Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Bapak Dr. Farid Hamid, M.Si
3. Sekretaris Program Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Bapak Heri Budianto, S.Sos, M.Si
4. Dosen Pembimbing pertama Dr. Henni Gusfa, yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan terhadap tugas proposal tesis ini.
5. Dosen Pembimbing kedua Bapak Afdal Makuraga, M. Si
6. Kepada dosen pengajar Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi, pada tingkat semester satu, dua, dan tiga.
7. Kedua Orang tua, Keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil sehingga tugas akhir ini dapat terlaksanakan dengan baik.
8. Teman-teman Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, atas segala dukungan, bantuan dan sarannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Tidak lupa penulis ucapkan kepada pimpinan Ta'lim Majelis Nashrunminalloh, Ustad Ahmad Zayadi, S.Ag beserta rekan-rekan teman talim.

Penulis menyadari dalam penulisan materi-materi bahan yang disusun semuanya tidak luput dari kekurangan yang ada, tentunya saran, kritik maupun masukannya yang konstruktif selalu penulis harap. Agar dalam proses penyusunan tugas proposal tesis, penulis dapat menambah penulisan yang dianggap kurang demi kebaikan keilmuan komunikasi.

Terima kasih

Jakarta, 10 Juli 2010

Achamd Budiman Sudarsono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, selama sekitar 30 tahun masa kejayaan Soeharto, suara masyarakat seakan terbungkam oleh peraturan yang dibuat oleh Soeharto. Negara yang berazaskan pancasila ini, seakan berubah menjadi negara otoriter. Kebebasan berkreasi seakan dibatasi oleh peraturan yang ada. Media seakan “dipakasa” tunduk pada aturan penguasa. Ide untuk keluar dari cengkram ini pun lahir dari pejuang reformasi, gerakan yang diimotori oleh mahasiswa membawa perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu perubahan yang cukup signifikan terjadi di bidang komunikasi, baik media cetak maupun media massa elektronik. Media seakan “sujud syukur” akan perubahan yang terjadi di bidang media.

Tidak bisa dipungkiri pesatnya pertumbuhan usaha pers, membawa dampak positif bagi masyarakat dan pemilik modal. Selain bisa turut menggerakkan roda perekonomian, lahirnya dan tumbuhnya media baru yang mencapai ribuan, harus diakui mampu menyediakan ruang luas bagi masyarakat untuk mengemukakan pikiran, ide, dan gagasan melalui tulisan maupun bercakapan di media elektronik. Akan tetapi lepasnya kebebasan pers, menjadikan media berpihak kepada pemilik modal.

Lihat saja kasus Lapindo yang berada di bawah bendera Bakry Grop. Dua media nasional TVOne dan Anteve seakan menutupi kasusu Lapindo lantaran Pemilik Modal

tersangkut persolan tersebut. Contoh lain pemilik modal juga dengan mudah mempromosikan suatu konsep pemikiran yang disiarkan langsung, misalnya deklarasi Nasional Demokrat (Nasdem) oleh Surya Paloh. Pendiri Nasdem sekaligus pemilik media Media Group (MetroTV dan Media Indonesia).

Media sendiri selain berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan, media juga bersifat mendidik, menghibur dan memberikan informasi. Pers juga mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selain itu pers sejak era reformasi membawa perubahan dalam menyampaikan informasi di media massa.

Faktor internal dan eksternal media ini semakin kuat pengaruhnya dalam dunia pers yang kian hari semakin menonjolkan watak industri. Hal ini bisa terungkap dari pesan yang disampaikan media tidak pernah bebas dari kepentingan bisnis. “Media pada era reformasi ini dapat bebas mengembangkan model pemberitannya sesuai dengan keinginannya.”¹ Apabila dilihat lebih lanjut media, kebebasan media tidak sepenuhnya milik media tersebut. Media sebenarnya tidak bisa disebut sebagai entitas yang benar-benar independen.

Maka dari itu, kala persoalan ini menjadi sebuah “dilema” media seolah mengemas media dengan berbagai cara. Uniknya masyarakat jadi bebas “diuntungkan” memilih media yang diinginkan tanpa harus membayar, tetapi hal harus harus terganggu oleh iklan komersial. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, masyarakat mempunyai banyak pilihan media, seperti majalah, surat kabar, tabloid, radio, televisi, film dan sebagainya yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dan pengaruh yang berbeda. Penulis memahami lahirnya media massa di Indonesia selalu

¹ . Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKIS, Yogyakarta, 2006

mempunyai kepentingan didalam memahami suatu realitas di masyarakat. Sehingga seringkali memasukan ideologi-ideologi yang cenderung kurang netral didalam setiap pemberitanya. Akhirnya media hanya dijadikan alat kepentingan untuk mendominasi.

Terlebih, media (pers) acap disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat.² Maka, ketika realitas sosial dipandang masyarakat suatu tontonan, media menciptakan peristiwa yang coba ditafsirkan oleh pemirsa, yang hasilnya dapat menguntungkan media tersebut. Realitas disini terlihat bukan sebagai penggambaran fakta, tetapi merupakan hasil pandangan media dari pemberitaan realitas. Maka dari itu, ketika realitas disajikan media massa akan terbentuklah suatu wacana. Sedangkan wacana dapat terbentuk ketika ada suatu peristiwa yang penting disajikan media bisanya menimbulkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga timbulnya pemberitaan di media.

Sedangkan analisis wacana lahir dari kesadaran persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas penggunaan kalimat, bagian kalimat atau fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren. Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use*). *Kedua*, analisis wacana merupakan usaha untuk memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi. *Ketiga*, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. *Keempat*, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (*what is said from is done*). Terakhir, analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional³.

Sedangkan Sparringa menjelaskan bagaimana analisis wacana bekerja. *Pertama*, dalam pengertian yang luas, yaitu bahasa dalam pengertian yang sempit, yaitu, kata-kata (berikut struktur, susunan, dan pilihan kata, atau bahwa intonasi pengekspresianannya), baik yang dikemukakan secara lisan maupun tulis merupakan wacana. Tidak ada bahasa yang tidak berkaitan dengan wacana

² Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

³ . Ibid, Alex Sobur

tertentu. Dalam bentuk yang ekstrim, “setiap kata mewakili wacana”. *Kedua*, dalam sebuah wacana selalu penting untuk memperhatikan tema sentral yang tersirat dalam kata. Dengan kata lain, analisis wacana selalu memperhatikan bagaimana sebuah kata itu diproduksi dalam sebuah konteks yang tertentu. Konteks yang melokalisasikan bagaimana kata itu berhubungan dengan kata-kata lainnya yang secara keseluruhan merupakan sebuah kompleks jaringan makna yang amat khusus.

Ketiga, apa yang dijelaskan diatas menegaskan, yakni bahwa, pertama, bagaimana analisis wacana memperlakukan bahasa sebagai bagian dari praktik sosial daripada semata-mata representasi dari aktivitas individual. *Kedua*, analisis wacana menegaskan tentang adanya hubungan diantara praktik sosial sebagaimana juga dapat ditemukan dalam hubungan diantara praktik sosial dan struktur sosial yang disebut terakhir merupakan kondisi sekaligus efek dari yang disebut pertama. *Ketiga*, wacana dibentuk dan dikendalikan oleh struktur sosial dalam pengertian yang seluas-luasnya dan dalam semua tataran. *Keempat*, pada sisi yang lain, wacana adalah fundamental secara sosial artinya, wacana selalu melibatkan proses formasi objek subjek, dan konsep yang tidak saja secara pasif mempresentasikan realitas, tetapi secara dialektika membuat realitas menjadi bermakna dengan mengkonstruksikan realitas tersebut secara aktif.

Keempat, terdapat tiga hal penting dalam analisis wacana. Pertama, analisis wacana memberikan perhatian pada usaha mengidentifikasikan dan melokalisasi identitas sosial dan posisi subjek. *Kedua*, analisis wacana membantu usaha mengkonstruksikan hubungan sosial diantara individu. Dan *ketiga*, analisis wacana memberikan alat untuk mengkonstruksikan sistem pengetahuan dan kepercayaan⁴.

Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik ini merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan diantara unsur tersebut. Sementara dalam lapangan politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa. Karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya, maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana.

Maka dari itu bila dipaparkan, wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan

⁴ . Daniel Sparringa. *Analisis Wacana; Teori dan Konsep Wacana*, Bahan Ajar Fisip Unair, Surabaya, 2000

penarfsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicara. Maka ketika wanita berpolitik dan dikemas didalam pemberitaan oleh media. Terlihat bagaimana berita tersebut diproduksi dan bagaimana kedudukan wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita. Dalam paradigma pluralis percaya bahwa wartawan dan media haruslah menggambarkan realitas yang terjadi dilapangan. Sementara paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya posisi tersebut mempengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, keberpihakan penelitian dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat menentukan bagaimana data/teks terhadap wanita dalam pandangan kritis. Ideologi penelitian mengenai feminis akan sangat mempengaruhi bagaimana teks itu harus dimaknai dan ditafsirkan. Peneliti yang mempunyai pandangan feminis percaya bahwa posisi wanita dan laki-laki seharusnya sejajar. Akan tetapi, dalam kenyataannya, dalam masyarakat posisi wanita selalu dimarjinalkan dan dipinggirkan. Dengan posisi semacam ini, tentu saja peneliti lebih berpihak kepada wartawan, kelompok yang meskipun sebagai korban kekerasan tetapi posisinya terpinggirkan.

Secara singkat lahirnya gerakan feminisme merupakan ide kaum feminis memperjuangkan hak persamaan antara pria dan wanita. Ini semua terlihat dari kesan kaum feminis bersifat “bermusuhan” atau anti lelaki. Ini memang ada benarnya, sikap tersebut terutama terdapat pada kelompok *radical feminisme*. Kelompok ini mengusulkan supaya wanita harus membentuk komunitas sendiri yang terpisah dari laki-laki. Persoalnya, setiap kali keduanya bercampur, pria akan selalu dominan, sedangkan wanita

akan menjadi kelas dominan. Karena itu ada yang menyebut kelompok radikal feminisme ini sebagai kelompok sparatis.

Sedangkan menurut artikel Rilus A Kinseng, gerakan feminis ini muncul sebagai sebuah dari tumbuhnya kesadaran, terutama dikalangan kaum wanita, bahwa kaum wanita menjadi “warga negara kelas dua” selama berabad-abad. Kaum wanita dianggap tidak layak untuk aktif berpartisipasi diberbagai bidang ilmu pengetahuan, politik dan berbagai sektor publik lainnya. Bahkan mereka dipandang tidak berhak memberikan suara dalam pemilu atau tidak mempunyai *right to vote*. Kaum feminis berpendapat bahwa selama ini kaum wanita menjadi kelompok yang selalu di dominasi (*dominated class*), dieksploitasi (*exploited class*), dan ditindas (*oppressed class*)⁵. Tetapi, Itu semua masih dalam lingkup pemikiran dunia barat.

Bagaimana dengan perjalanan feminisme di Indonesia?. Sedangkan feminisme di Indonesia yang paling fenomenal telah dimulai pada abad 18 oleh Raden Ajeng Kartini melalui hak yang sama atas pendidikan bagi anak-anak perempuan. Siapakah R.A Kartini? Dia adalah seorang perempuan Jawa, cerdas, perspektif, pemberontak tapi juga anak Bupati Jawa, penun cita-cita pengabdian tapi juga lemah hati, dan sementara itu terpojok, kecewa, terikat, dan akhirnya meninggal dalam usia umur 24 tahun. Tak mengherankan bila pemikiran feminisme Indonesia awal ini lebih sering dihadirkan dalam bentuk ‘siapa’ (tokoh Kartini).

Menarik untuk dicermati Kartini orang bicara sebagai tokoh ketimbang pokok. Ide Kartini bukan datang dari ide. Berbeda dengan banyak pemikiran feminisme di Indonesia akhir abad ke-20, dalam buku “Aku Mau Feminisme dan Nasionalisme” dikatakan bukan karena gagasan feminisme maka Kartini ada, tetapi karena Kartini ada, maka ia seorang

⁵ . Rilus A Kinseng, *Relevansi Feminisme di Indonesia*, Koran Suara Pembaruan, Jakarta, 1994

feminis.⁶ Perjuangan Kartini terlihat kala tulisannya kepada sahabatnya di Belanda Stella Zeehandelaar pada tahun 1899-1903.

Dalam sepucuk surat betanggal 18 Agustus 1899, misalnya, ia menulis: “sebelum kamu mengatakan bahkan akau tidak tahu kalau akau keturunan bangsawan”. Tampak bahwa Kartini mencoba meletakkan dirinya dalam suatu latar sosial yang sebenarnya tak persis ada padanannya dalam pengalaman Eropa dan kemudian menunjukkan sulitnya kedua pengalaman dipertukarkan. Boleh dibilang inspirasi perjuangan Kartini telah mendunia, kini banyak Kartini-kartini Indonesia yang berhasil memperoleh prestasi di bidang akademik pada ajang kejuaraan Internasional.

Dengan semangat Kartini yang ada, banyak wanita terus melakukan perjuangan membantu kehidupan keluarga dengan bekerja. Banyak pekerjaan yang dahulu tidak bisa atau tidak boleh dilakukan wanita, sekarang lazim saja dilakukan oleh wanita. Kebutuhan akan tenaga kerja akibat perkembangan sosial-perekonomian, menyebabkan wanita terjun ke lapangan kerja. Demikian juga berkembangnya berbagai jabatan baru yang tidak tergantung dari jenis kelamin (misalnya: operator komputer) menyediakan peluang bagi wanita.

Pertanyaan yang muncul, apakah feminisme itu relevan di Indonesia? Apalagi di era pascamoderenisme ini, dimana kebebasan dan otonomi individu telah digugat secara radikal. Melihat kondisi yang ada, perjuangan kaum feminis itu masih sangat relevan. Persoalannya bukan terletak pada perlu tidaknya atau relevan tidaknya feminisme itu sendiri, tapi terletak pada makna yang diperjuangkan dan penjabarannya. Feminisme sangat menghargai pilihan-pilihan pribadi dari seorang perempuan: apakah akan meniti karir atau mencurahkan seluruh waktu pada keluarga.

⁶ .Vissia Ita Yulianto, *Aku Mau Feminisme dan Nasionalisme*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2004

Masalahnya adalah, apakah kita sudah siap memasuki suatu zaman yang lebih sederajat dan adil? Juga apakah struktur sosialnya sudah mendukung untuk itu? Kita tampaknya sedang dalam perjalanan ke arah itu. Intinya, suka atau tidak suka perjuangan ini harus tetap didukung.

Maka dari itu, sejalan dengan perjalanan perempuan berpolitik, maka kebijakan politik yang pro terhadap peningkatan kuantitas keterwakilan perempuan semakin berkembang. Terbukti dengan digulirkannya kuota keterwakilan perempuan di Legislasi sebesar 30 persen. Hal ini dimaksudkan untuk melawan dominasi laki-laki di parlemen. Tuntutan akan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif sudah terpenuhi setelah diundangkannya UU Pemilu. Perjuangan tanpa mengenal lelah dari para aktivis pemberdayaan perempuan baik di legislatif, Eksekutif, LSM, dan juga media. Merupakan bukan bentuk hadiah apalagi sebuah belas kasihan. Tetapi ini adalah hak perempuan yang cukup sulit memperjuangkan bahkan “sempat gagal” memasukan masalah kuota ini ke dalam UU Partai Politik.

Masuknya soal kuota di dalam UU Pemilu merupakan awal perjuangan dan merupakan peluang yang harus ditangkap. Karena itulah berbagai kegiatan pendidikan politik untuk calon legislatif perempuan pun sekarang bisa dikatakan secara maraton diselenggarakan berbagai pihak. Selain dari masing-masing partai-partai, secara intensif Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Gerakan Pemberdayaan Perempuan (GPSP) dan beberapa organisasi non-pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain juga melakukan hal yang sama. Semua memikirkan secara bersamaan bahkan lintas partai, lintas golongan, bagaimana peluang yang sudah terbuka itu bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Bukan hal yang mudah, ditengah gencarnya para aktivis melakukan pendidikan politik secara non-partisipan, suara-suara sumbang pun bermunculan. Mulai dari soal kulaitas perempuan, siapakah perempuan mengisi kuota sampai apakah tidak khawatir jika 30 persen perempuan yang ada di legislatif itu hamil bersamaan. Juga ada suara sinis yang mengatakan perempuan itu emosional, sehingga kalau berdebat dalam sidang nanti bisa “jambak-jambakan”.

Sementara dari dalam partai politik sendiri, kendalanya menjadi tidak ringan pula. Mengingat perempuan di dalam partai politik seringkali berada di luar struktur kepengurusan sedang rekrutmen caleg biasanya menguntungkan petinggi partai yang *notabennya* adalah laki-laki. Kalau memang Partai serius memperjuangkan kuota perempuan di Parlemen, seharusnya tidak angka 30 persen yang di Undang-undangkan. Tetapai angka 50 persen kuota yang diperjuangkan. Ini baru yang namanya seimbang didalam memperjuangkan hak perempuan di Parlemen.

Sedihnya, penetapan angka 30 persen sebenarnya berdasarkan referensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan riset Prof Drude Dahlerup dari Stockholm University, yang menyatakan angka 30 persen sebagai *critical numbers* untuk bisa mempengaruhi kebijakan⁷. Jadilah angka itu menjadi “mitos” partai politik untuk merebut pasar pemilih perempuan. Secara normatif, dengan raihan suara 30 persen tidak berimplikasi untuk merebut kekuasaan, namun angka itu mampu “menusuk” pada jantung kekuasaan ologarki partai. Makanya tidak heran, angka ini mendapat resistensi keras dari kalangan politisi laki-laki, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun yang ada di partai.

⁷ . Majalah Figur, *Politik Perempuan Perempuan Politik*, Jakarta 2008

Memang mengisi 30 persen keterwakilan perempuan, terus mengalami hambatan. Bukan persoalan jumlah yang tentu cukup banyak diperlukan kalau kuota ini dipenuhi di semua wilayah di negeri ini dan juga di semua tingkat baik dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi dan kabupaten /kota. Sebab dengan jumlah perempuan pemilih menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2000 mencapai 51 persen atau 101.625.816 jiwa, masih banyak yang belum memahami termasuk mengapa harus diperjuangkan habis-habisan soal keterwakilan perempuan sampai 30 persen di legislatif.

Lemahnya rekrutmen partai dan keengganan memberikan porsi lebih didalam proses berdemokrasi ditanah air menyebabkan suara wanita di DPR sampai saat ini masih samar-samar. Meski ada mitos bahwa politik adalah urusan pria, tetapi peran wanita di dunia politik memberikan efek kekuatan mesin politik sebuah Partai. Bahkan kaum perempuan pada pemilu masa kini telah menjadi motor penggerak demokrasi bangsa di masa depan. Lihat saja suara yang diberikan Rieke Diah Pitaloka PDI-P daerah pemilihan Jabar II, Rachel Mariam Sayidina Gerindra Jabar II, Theresia EE Pardede Demokrat Jabar IV, Vena Melinda Demokrat Jatim VI, Nurul Arifin Golkar Jabar VIII. secara perhitungan mampu memberi suara partai dan mengantarkn mereka ke Senayan.

Setelah sepuluh kali pelaksanaan pemilihan umum sejak 1955 hingga 2009, partisipan perempuan masih minim jika dibandingkan dengan laki-laki. Baik dalam menggunakan hak pilihnya maupun hak untuk dipilih yang secara nyata dijamin dalam konstitusi. Tidak heran jika penuls baca dan hitung, sampai saat ini jumlah perempuan yang duduk di legislatif hanya sekitar 18 persen, atau sekitar 102 orang dari 560 jumlah keseluruhan anggota DPR.

Keterwakilan perempuan berdasarkan partai, Demokrat 28 orang, Golkar 16 orang, PDI.P 16 orang, PKB 8 orang, PAN 6 orang, PPP 6 orang, Gerindra 5 orang, PKS 3 orang, dan Hanura 3 orang. Bila dijabarkan, jumlah anggota perwakilan perempuan di DPR RI periode 2009-2014 sebanyak 92 anggota, dua orang sebagai Ketua di Komisi V dan IX, dua Wakil Ketua di Komisi IV dan VIII, dan delapan puluh delapan anggota tersebar di Komisi I sampai XI. Lebih lanjut, penetapan kuota sebesar 30 persen keterwakilan perempuan di DPR, seharusnya berjumlah 168 anggota. Akan tetapi, dari data yang diperoleh di lapangan, hanya 92 anggota atau 16,4 persen keterwakilan perempuan di DPR RI.

Memang tidak menjadi jaminan bahwa perempuan yang ada di legislatif nantinya akan bersuara lantang menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili. Apalagi dengan kencang bergandeng tangan dengan laki-laki yang memiliki sensitivitas jender didalam komisi di legislasi. Apalagi seringkali para anggota legislatif kemudian menjadi wakil partai bukan lagi wakil rakyat yang berkewajiban menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Maklum bila didalam perjalanannya bisa dimaklumi jika muncul pertanyaan miring mengatakan, mengapa perempuan *ngotot* dengan kuota 30 persen. Dikalangan perempuan sendiri harus diakui ada pendapat yang sangat beragam. Kalau pertanyaan itu muncul karena selama ini perempuan lebih dibuat akarab dengan ranah domestik sehingga kurang bisa melihat pentingnya sisi publik di ranah politik. Padahal begitu banyak permasalahan perempuan yang selama ini terabaikan.

Lalu dimana letak posisi Majalah Figur didalam mengemas pemberitaan terkait perempuan berpolitik? Majalah Figur sebagai media politik dalam memproduksi teks

berita selalu dikatikan dengan dua persolan, yang pertama penulisan terkait dengan materi. Sedangkan yang kedua penulisan berdasarkan investigasi mendalam. Terkait dengan persoalan materi, keberpihakan penulisan oleh wartawan cenderung melemah, jadi seakan ada pelemahan penulisan pemberitaan yang terkait dengan materi. Penulis harus mengikuti keinginan narasumber didalam memproduksi teks berita. Sedangkan penulisan secara investigasi wartawan harus mempertanyakan persolan ini secara kritis, sehingga penulisan terlihat lebih kritis dan bebas berekspresi.

Sedangkan dalam majalah Femina yang dikenal sebagai media wanita, mencoba memberikan suasana politik didalam penulisan artikel pada edisi April 2010. Hal ini menjadi menarik, Majalah Femina yang biasa menampilkan cerita wanita dalam ruang lingkup kesharian. Kini dalam edisi Kartini, Femina mencoba menampilkan tokoh-tokoh wanita sukses didalam dunia karir. Lalu kenapa Femina hanya menampilkan edisi ini pada bulan April saja? Seharusnya cerita ini bisa diungkap disetiap edisi, jadi pembaca bisa termotivasi untuk menjadi wanita yang sukses. Bukan hanya menampilkan busana yang trendy tipa bulannya, hal ini seolah memotivasi wanita untuk terus berbelanja. Walau tidak banyak, informasi ini sedikit menjadi sebuah perbandingan dalam pengemasan pembautan artikel beritanya.

Maka dari itu didalam konteks penelitian penulis, penulis mencoba membandingkan rubrik yang ditulis Majalah Figur dan Majalah Femina dalam edisi perempuan April 2010. Majalah Figur sebagai media kebijakan politik yang selalu hadir tiap bulan, sedangkan Majalah Femina sebagai majalah wanita mingguan selalu hadir dalam trend gaya hidup wanita masa kini. Maka persoalan ini akan penulis bahas dalam model teori Teun A Van Dijk. Penulis akan membaedah isi teks yang disampaikan kedua media tersebut. Apakah

ada persamaan atau perbedaan didalam penulisan artikel yang ditulis oleh masing-masing wartawan?. Mendukung, netral, atau memojokan perjuangan wanita di dalam dunia politik.

Memang didalam paradigma kritis melihat bahwa media bukanlah saluran yang bebas dan netral. Media justru dimiliki oleh tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan. Oleh Karen itu, pertanyaan pertama dari paradigma kritis adalah siapakah (orang/kelompok) yang menguasai media? Apa keuntungan yang didapat oleh seseorang/kelompok tersebut dengan mengontrol media? Pihak mana yang tidak dominan, sehingga tidak bisa mempunyai akses dan kontrol terhadap media bahkan hanya menjadi objek pengontrolan? Aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi, termasuk komunikasi massa.

Dalam studi analisis teks berita, paradigma kritis terutama berpandangan bahwa berita bukanlah sesuatu yang netral, dan menjadi ruang publik dari media, sebaliknya, adalah ruangan dimana kelompok dominan lain yang tidak dominan. Demikian, minat khusus dari analisis wacana dalam pemberitaan adalah menemukan dan mengimigrankan gelap, petani penggarap, komunis, diberitakan dan dimarjinalkan dalam pemberitaan.

Oleh karenanya model analisis wacana banyak diperkenalkan oleh Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. van Dijk, dan Norman Fairclough. Akan tetapi untuk persoalan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan teori Teun A. van Dijk.

Model teori van Dijk dikenal dengan kognisi sosial atau proses produksi melibatkan suatu proses bagaimana produksi teks itu bekerja, kenapa teks tersebut mengangkat tema

tersebut. Dalam penelitiannya wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus diamati. Selain itu teori ini juga melihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. Kekeritisan ini yang membuat penulis ingin menggunakan teori Teun A. van Dijk sebagai pisau analisisnya.

Ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk itu berpengaruh terhadap teks tertentu. Wacana van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks teks.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari masyarakat akan suatu masalah⁸. Analisis van Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian melalui pada teks ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks berita itu diproduksi dan dibaca pembaca.

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

Fenomena feminisme di dunia politik dalam pemberitaan media massa sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan, sehingga dalam penelitian ini timbul suatu permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti berdasarkan fakta di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sudut pandang Majalah Figur dan Majalah Femina di dalam mengemas isi teks artikel berita dalam posisi perempuan berpolitik?

⁸ . Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Lkis, Yogyakarta, 2005

2. Mengapa Majalah Figur dan Majalah Femina tertarik menampilkan edisi perempuan April 2010 dalam sidang redaksi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengetahui wacana feminisme pemberitaan Majalah Figur terkait kuota 30 persen perempuan didalam produksi teks dan penulisan teks berita

Tujuan Penelitian

1. Untuk membongkar setiap makna teks yang dibuat oleh Majalah Figur dan Majalah Femina mengenai peran perempuan berpolitik
2. Untuk memahami konsep feminis didalam persoalan perempuan berpolitik di bulan April 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang akan memperdalam studi mengenai wacana feminisme di dunia politik dan memberikan pemecahan yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi ataupun sebagai bahan perbandingan.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan di dalam membantu dewan redaksi Majalah Figur dan Majalah Femina menganalisis lebih dalam terkait persoalan peran perempuan dalam berpolitik

2. Penelitian ini menjadi masukan bagi partai politik didalam mencari solusi memperjuangkan perempuan di dunia politik
3. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dokumentasi karya ilmu pengetahuan terutama pada bidang komunikasi politik yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa jurusan komunikasi pemasaran dalam penyusunan karya ilmiah berikutnya.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan permasalahan yang ada, maka peneliti mencoba mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk dijadikan acuan dan konsep berfikir peneliti. Peneliti mencoba mempelajari dan mencari tahu arah penelitian mereka mengenai feminisme ataupun permasalahan gender. Semua tesis yang peneliti bandingkan berasal dari kampus Universitas Indonesia.

Hasil penelitian ini dikaji oleh penulis, melalui penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2002), Tesis Universitas Indonesia tentang Relasi Gender di Dunia Domestik dalam Media Cetak (Analisis Wacana Terhadap Peran-peran Perempuan yang Terhadap dalam Artikel Majalah Ayah Bunda). Hasil penelitiannya, dalam teks media deskripsi posisi perempuan di wilayah domestik menjadi sangat jelas, walaupun demikian satu hal yang penting ditekankan disini adalah bahwa sebuah teks dapat memiliki banyak makna sesuai dengan kepentingan pihak-pihak menginterpretasikannya.

Berikutnya oleh, Chatania Wahyuni (2004), Tesis Universitas Indonesia tentang Ideologi Gender di Media Remaja Suatu Studi Analisis Wacana Majalah Kawanku. Hasil penelitiannya bahwa peran gender yang dijalankan tokoh perempuan di Majalah Kawamku adalah peran ganda atau sebenarnya beban ganda. Perempuan adalah seorang yang aktif diwilayah publik yaitu bekerja atau beraktifitas diluar rumah tetapi juga aktif diwilayah domestik yaitu mengurus rumah tangga dan berbakti pada suami dalam

pengertian menyenangkan suami dengan tampilan cantik, merawat diri dan melayani kemauan dan selera suami.

Lalu Marisa Puspita Sari (2005), Universitas Indonesia, dengan judul Jurnalisme Berspektif Gender di Dua Surat Kabar Nasional (Analisis Farming Terhadap Pemberitaan Isu-isu Gender di Kompas dan Sinar Harapan. Dalam penelitian ini diungkapkan bagaimana pemberitaan terhadap isu-isu gender yang ditampilkan Sinar Harapan menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang tidak hanya diperlukan intervensi dari aparat hukum dan pemerintah, tetapi juga penanganan yang serius terhadap permasalahan yang menimpa kaum perempuan yang menyebabkan dirinya tertindas dan tersubordinasi.

Sedangkan Kompas lebih menekankan adanya persoalan kesetaraan gender dalam bentuk ketidakadilan perlakuan dan kesempatan terhadap perempuan adalah masalah yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran perempuan sendirian akan hak-haknya, kondisi sosial kultur yang mengedepankan budaya patriarkis, kebiasaan atau adat.

Studi Penelitian Terdahulu

Penulisan proposal tesis ini berdasar penelitian sebelumnya dengan judul:

Nama	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Kritik
Indriastuti Universitas Indonesia Tesis 2002	Relasi Gender Di Dunia Domestik Dalam Media Cetak (Analisa Wacana Terhadap Peran-peran Perempuan yang Terdapat dalam Artikel Majalah Ayah Bunda)	Jenis Penelitian Kualitatif Metode Deskriptif Paradigma Interpretif	Dalam teks media deskripsi posisi perempuan di wilayah domestik menjadi sangat jelas, walaupun demikian satu hal yang penting ditekankan disini adalah bahwa sebuah teks dapat memiliki banyak makna sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang menginterpretasikannya.	Penempatan perempuan memiliki kecenderungan yang tidak memihak kepada perempuan karena keberadaan perempuan selalu dikaitkan dengan keberadaan pihak lain yakni suami dan anak

Chatania Wahyuni Universitas Indonesia 2004	Ideologi Gender di Media Remaja Suatu Studi Analisis Wacana Majalah Kawanku	Jenis Penelitian Kualitatif Metode Analisis Wacana Kritis Paradigma Kritis	Peran gender yang dijalankan tokoh perempuan di Majalah Kawanku adalah peran ganda atau sebenarnya beban ganda. Perempuan adalah seorang yang aktif di wilayah publik yaitu bekerja atau beraktifitas diluar rumah tetapi juga aktif di wilayah domestik yaitu mengurus rumah tangga dan berbakti pada suami dalam pengertian menyenangkan suami dengan tampil cantik, merawat diri dan melayani kemauan dan selera suami.	Ada berapa aspek yang menjadi kelemahan penelitian ini, yaitu dari aspek paradigma. Dilihat dari aspek paradigma, penelitian ini memiliki kelemahan dalam aspek untuk menjadikan kajian yang emansipatoris untuk memenuhi sifat emansipatoris ini tidak jarang terjadi pembenaran nilai-nilai kelompoknya sendiri dengan mengabaikan nilai kelompok lain
Marisa Puspita Sari Universitas Indonesia 2005	Jurnalisme Berspektif Gender di Dua Suart Kabar Nasional (Analisis Farming Terhadap Pemberitaan Isu-isu Gender di Kompas dan Sinar Harapan	Jenis Penelitian Kualitatif Metode Analisis Farming Paradigma Konstruktivisme	Pemberitaan terhadap isu-isu gender yang ditampilkan Sinar Harapan menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang tidak hanya diperlukan intervensi dari aparat hukum dan pemerintah, tetapi juga penanganan yang serius terhadap permasalahan yang menimpa kaum perempuan yang menyebabkan dirinya tertindas dan terseubrdinasi. Kompas lebih menekankan adanya persoalan kesetaraan gender dalam berbagai bentuk ketidakadilan dan kesempatan terhadap perempuan adalah masalah yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran perempuan sendirian akan hak-haknya, kondisi sosial kultur yang mengedepankan budaya patriarkis, kebiasaan atau adat.	Pemberitaan isu gender yang terdapat pada Sinar Harapan dan Kompas, pemberitaan isu-isu gender yang ditampilkan terlihat sebagai bentuk idealisme dan kesadaran media. Bahwa media melakukan konstruksi atas realitas sosial yang terjadi. Media justru membingkai realitas sosial sesuai dengan visi, misi, dan sistem lainnya.
Ummy Hanifah	Konstruksi Ideologi Gender Pada Majalah	Jenis Penelitian Kualitatif	Dari level teks penelitian memperoleh lima baingkai yang dibawa	Penelitian ini hanya diposisikan pada analisa intertekstual yang

Universitas Indonesia 2004	Wanita (Studi Analisis Wacana Kritis Pada Majalah Ummi)	Metode Analisis Wacana Kritis Paradigma Konstruktivisme	oleh Ummi, yaitu peran ganda, menjaga niat dalam bekerja, dikotomi peran dalam keluarga, meandiri dan kesetaraan. Dari level teks ini tercermin ideologi yang dipegang Ummi yaitu Islam.. Selain itu majalah Ummi secara konsisten mengkonstruksikan peran ganda perempuan dan mendukung adanya pembagaan peran di dalam keluarga. Dikotomi peran ini tampak ketika perempuan yang berkiprah di sektor publik dituntut pula untuk dapat berperan sisektor domestic	sifatnya sangat interpretif. Sehingga kemampuan dan pengetahuan si peneliti sangat menentukan hasil analisis dan mengakibatkan tingkat penelitian tertuju pada teks.
Achmad Budiman Sudarsono UMB Tesis 2011	Wacana Feminisme di Dunia Politik dalam Bingkai Berita Majalah Figur Edisi Perempuan 2008 - 2010	Jenis Penelitian Kualitatif Metode Analisis Wacana Kritis Paradigma Kritis	-	-

2.2 Analisa Wacana Kritis

Analisa wacana kritis, pendekatan ini digunakan untuk menganalisa teks yang menitikberatkan pada implikasi sosial, politik dan budaya pada teks yang kita perlakukan dan kita produksi. Wacana adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu praktek sosial yang ada dengan menggunakan sudut pandang tertentu dengan kata lain wacana adalah sebuah konstruksi atau signifikasi beberapa praktek sosial dari sebuah perspektif⁹. Bahasa yang dimaksud di sini bukan hanya bahasa lisan saja tetapi juga tertulis. Jadi wacana-wacana tersebut berhubungan dengan pengetahuan dan bagaimana

⁹hal 41

sebuah pengetahuan itu dibentuk. Analisa wacana ini digunakan oleh para ahli penganalisa sosial maupun bahasa.

Melihat bahasa sebagai praktik sosial, seperti pendapat Fairclough, mempunyai implikasi tertentu pertama bahasa sebagai *mode of action*, sebagaimana yang dikenal oleh filosofi linguistik dan studi pragmatik. Implikasi selanjutnya adalah bahasa merupakan *mode of action* yang dibentuk secara sosial dan sejarah, dalam hubungan yang dialektis di sini adalah bahwa secara sosial bahasa dibentuk dan sebaliknya bahasa membentuk keadaan sosial, atau menurut istilah Fairclough, *socially constitute*. Analisa wacana kritikal menggali tekanan antara dua kutub ini baik penggunaan bahasa dan pembentukan secara sosial maupun *social constitute*.

Para pengamat bahasa teks tradisional cenderung untuk mengabaikan dan menyembunyikan implikasi tersebut dengan demikian mereka mendukung suatu status quo tertentu. Sementara itu para analis wacana berusaha untuk mencari dan menemukan implikasi yang tersembunyi itu¹⁰. Oleh sebab itu analisa wacana justru memfokuskan pada pesan laten. Begitu banyak teks komunikasi yang disajikan secara implisit sehingga makna suatu pesan tidak dapat ditafsirkan sebagai makna yang tampak dari teks, namun harus dianalisa dari mana yang tersembunyi, jadi titik berat analisa wacana adalah pada muatan, nuansa dan makna laten dalam teks media¹¹.

Bagi Fairclough wacana, termasuk wacana media melibatkan dua hal yang saling melengkapi yaitu *communicative event* serta *the order of discourse*. Analisa wacana kritikal dalam *communicative event* adalah analisa yang melihat hubungan antara teks, praktek wacana, dan praktek sosiokultural. Jadi tekanannya pada praktek-praktek dan

¹⁰ hal 42

¹¹hal 42

teks, termasuk juga praktek-praktek wacana dan praktek-praktek sosiokultural. Praktek wacana sendiri misalnya, adalah bagaimana sebuah teks itu dihasilkan oleh para pekerja media dalam isntitusi media yang bersangkutan, dan bagaimana sebuah teks diterima oleh si audience, yaitu pembaca, pendengar ataupun penonton, serta bagaimana sebuah teks media didistribusikan. Sehingga analisa wacana dapat dimengerti sebagai usaha untuk menggambarkan hubungan yang sistematis antara teks, praktek wacana dan praktek-praktek sosiokultural.

2.3 Teks

Teks adalah komponen penting dalam analisa wacana. Ada beberapa definisi teks. Kata text berasal dari bahasa latin *texere, txtum – to weave*, arti originalnya adalah sesuatu yang dapat dirajut¹². Fairclough menggunakan teks dalam tiga arti yaitu pertama sebagai kata-kata yang digunakan oleh para ahli bahasa, baik untuk bahasa lisan maupun tertulis, di dunia siaran transkrip yang digunakan merupakan sebuah teks demikian pula artikel pada koran-koran. Kedua, dalam kasus tv image visual dan juga efek suara termasuk dalam kategori teks. Ketiga baalah pandangan multifungsional tentang teks yang diambil dari teori ‘systemic’ dari bahasa¹³. Teks juga dapat didefinisikan sebagai bukti nyata dari tujuan interaksi diri yang masuk akal anatara satu atau lebih penulis dan satu atau lebih pembaca, dimana penulis memegang kontrol dan menghasilkan semua bahasa¹⁴. Semua interaksi yang terjadi dapat disebut sebagai wacana. Definisi ini termasuk juga bahasa lisan, dan juga pidato.

¹²hal 46

¹³hal 46

¹⁴46

Teks merupakan *site of interaction*¹⁵. Di dalam teks terdapat intraksi antara para produser teks dengan audience. Hubungan intraksi ini berjalan rumit, sebab para produser tersebut memiliki tujuan dalam berkomunikasi dengan para audiencenya, jadi kewajiban si produser untuk menghasilkan teks yang dapat mencapai tujuannya, baik itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan audeinc aktualnya. Sementara itu audince, mempunyai tujuan tersendiri dalam mengkonsumsi teks tersebut yang mungkin sesuai ataupun tidak dengan apa yang dipikirkan oleh penulis, atau kata lain bisa saja tujuan audience mengkonsumsi teks tidak sesuai dengan tujuan dasar si penulis. Menurut Hoey, memahami teks akan membantu hipotesa pemahaman bagaimana sebuah teks itu dibangun dimana hipotesa ini akan membantu memahami dan menginterpretasikan teks¹⁶

Selain sebagai *site of interence*, ada pula yang menganggap teks sebagai '*site of engagement*' dimana teks dimungkinkan untuk *appropriation* (seperti membaca, melihat dan interprestasi) serta *use* (menulis, produksi dan sebagainya) dalam lingkup pesan yang dimediasi. '*site of engagement*' adalah jendela-jendela yang didefinisikan oleh berbagai praktek sosial yang luas. Konsep ini merupakan sebuah jendela yang terbuka terhadap persimpangan praktek sosial dimana para partisipan mengisi teks untuk semua tindakan yang dimediasi¹⁷

Teks membuat makna tertentu, ini sehubungan dengan kemampuan teks itu sendiri yang dapat membangkitkan pengetahuan dan kemampuan bagi si audiens untuk menghasilkan pemahaman karena si audience berhubungan dengan *raw material of meaning* yang dikandung oleh teks tersebut (Lehtonen, 2000 : 79). Teks dalam berbagai bentuknya dikarakteristikan oleh tiga hal yaitu,

¹⁵46

¹⁶48

¹⁷48

materiality, yaitu tanda – tanda dari teks tersebut yang berupa fisik dan materi. Kedua adalah *formal relationship* bahwa ada hubungan formal tertentu antara setiap tanda yang terdapat dalam teks. Terakhir adalah *meaning fullness* (lehtonen : 73).

Analisa teks ditekankan baik pada makna dan juga bentuknya. Kedua faktor ini tidak bisa dipisahkan sebab keduanya saling melengkapi. Makna yang berbeda akan membentuk – bentuk yang berbeda atau sebaliknya bentuk yang berbeda akan memberi makna yang berbeda.

Teks memiliki tiga fungsi utama yaitu ideational, bahwa teks mengandung sistem pengetahuan dan kepercayaan. Fungsi kedua adalah interpersonal yaitu adanya hubungan sosial dan identitas sosial. Terakhir adalah tekstual. Berhubungan dengan fungsi tersebut maka dalam teks biasanya adanya tiga hal yang ditekankan adanya representasi atau rekonstruksionalisasi tertentu dari praktek sosial seperti ada atau tidaknya ideologi tertentu dalam teks. Selanjutnya adalah konstruksi tertentu dari identitas penulis atau pembaca. Hal ketiga yang yaitu, konstruksi tertentu dari hubungan antara penulis dan pembacanya (fairlough, 1995 : 58)

2.4 Konteks

Teks bisa mempunyai makna jika dilingkupi oleh sebuah konteks, tanpa konteks teks tidak berarti. Oleh karenanya pada analisa wacana konteks sangat penting. Makna dapat diberikan secara pas bila kita mengetahui konteksnya teks dapat mempunyai makna yang berbeda jika ia berada dalam konteks yang berbeda

pula. Konteks disini bukan hanya berada dalam artian sempit seperti konteks situasi, misalnya, dimana sebuah teks dihasilkan tetapi juga konteks dalam arti yang lebih luas seperti konteks sosial dan budaya. Sebab, menurut Fairclough, konteks dalam arti luas juga perlu diperhatikan karena hal tersebut juga memberi pengaruh pada pembentukan praktek wacana pada gilirannya wacana secara kumulatif akan membentuk konteks. Hal ini terlihat jelas pada kasus media (Fairclough, 1995 : 50). Contohnya adalah wacana tentang perempuan di media jika dulu pada jaman orde baru, perempuan yang di jaman orde baru kata yang sering digunakan adalah waniata, dimana kata awanita di jaman orde baru selalu digambarkan sebagai tiang rumah tangga yang memegang tanggung jawab penuh atas dunia domestiknya. Waniata yang luhur adalah wanita yang bisa mendampingi tugas suami. Namun sekarang wacana tentang wanita, bukan lagi seperti itu tetapi cenderung kepada pemberdayaan yang tidak lagi terfokus pada dunia domestik semata. Juga kalau kita cermati, kata waniata' hampir tidak pernah lagi digunakan sebagai gantinya digunakan kata 'perempuan'.

Jadi, perubahan pada konteks yang lebih luas juga akan mempengaruhi wacana dan sebaliknya wacana akan mempengaruhi konteks yang lebih luas, misalnya wacana perempuan yang mengalami perubahan akan mempengaruhi kebijaksanaan negara tentang perempuan yang untuk selanjutnya akan memberi dampak bagi kondisi sosial dan budaya yang menyangkut perempuan di negara ini. Dalam hal tersebut ada keterkaitan yang erat dengan posisi media, sebab media dibentuk oleh masyarakat yang lebih luas, tetapi kemudian media memegang peran yang penting dalam penyebaran perubahan sosial dan budaya,

hal tersebut, menurut Fairclough, haruslah menjadi fokus dari analisa media. Ada beberapa isu yang perlu diperhatikan seperti perubahan konstruksi hubungan gender, ras, dan kelas (Fairclough, 1995 : 51).

2.5 Analisa intelektual

Analisa intelektual memfokuskan diri pada daerah antara teks dan praktek wacana. Jadi analisa ini berusaha melihat teks dari sudut pandang praktek wacana, sering kali praktek wacana. Tujuan dari analisa intertekstual ini adalah untuk mengurai berbagai genre dan wacana, sering kali praktek wacana yang bersifat kreatif dan kompleks yang ditampilkan secara bersamaan dalam sebuah teks.

Jika para analis linguistik lebih bersifat deskriptif dalam memberikan hasil analisisnya, maka pada analisa intertekstual sifatnya lebih interpretatif. Biasanya pada analisa linguistik teks digunakan sebagai bukti – bukti sedangkan pada analisa intertekstual menggunakan teks untuk diinterpretasikan dan memperlakukan teks dalam kerangka sosial dari praktek wacana. Oleh sebab itu, hasil analisa ini sangat bergantung kepada kemampuan dan pengetahuan analisisnya tentang kondisi sosial dan budaya tertentu.

Intertekstual dalam pandangan fisik berhubungan dengan bidang semiotik menurutnya ini adalah cara bagaimana teks media membuat subangsih secara budaya. Ia berpendapat bahwa teks saling berhubungan satu sama lain dengan demikian dapat membuat makna bagi audiensnya. Intertekstual bekerja dalam dua dimensi. Pertama, dimensi horizontal, pada dimensi ini intertekstual

bekerja melalui faktor – faktor seperti genre, karakter dan isi. Disini hubungan dengan teks lain bersifat eksplisit.

Kedua, dimensi vertikal, dalam dimensi ini teks merujuk secara khusus pada teks lain. Dimensi tersebut intertekstual bisa ditempatkan dalam konteks yang lebih luas seperti konteks ekonomi. Intertekstual pada dimensi ini akan kelihatan lebih jelas bila sebuah teks secara eksplisit mendukung teks lain (Fiske, dalam Taylor & Willis, 1999 : 80-81).

Sebuah hal yang penting dikenali lebih dahulu, sebelum melakukan analisa ini, adalah macam – macam wacana atau tipe – tipe wacana sebab tipe wacana berhubungan dengan bentuk konfigurasi anatara genre dan wacana yang biasanya selalu muncul. Konfigurasi itu bisa saja kompleks karena terdiri dari beberapa genre dan wacana sekaligus tetapi juga bisa dalam susunan yang sederhana yakni hanya satu genre atau pun satu wacana. Selain itu genre dan wacana dalam sebuah tipe wacana bisa saja saling melengkapi atau sebaliknya. Oleh Fairclough disebutkan bahwa salah satu aspek dalam menganalisa tipe wacana adalah untuk melihat keselarasan atau tidaknya (Fairclough : 76). Hal berikut yang perlu diperhatikan adalah struktur komposisi dari tipe wacana.

Tipe wacana ini bisa dianalisa melalui genre dengan tipe cara yaitu schematic view, dimana genre bisa dilihat sebagai tipe aktivitas, sebuah struktur skematis palsu dari tingkatan – tingkatan, baik itu semua yang bersifat penting atau tidak terlalu penting dan beberapa yang bersifat pilihan, yang muncul secara tetap atau tidak sepenuhnya tetap dalam sebuah tatanan. Cara pandang genre seperti

ini biasanya digunakan oleh para ahli bahasa (Fairclough : 85). Konsepsi diatas sangat tepat jika digunakan untuk melihat rutin dan standarisasi output media.

Konsepsi selanjutnya berkaitan dengan pembatasan sosial terhadap praktek jurnalistik yang selalu mengalami negosiasi melalui pemilihan opsi dalam sebuah jaringan strategi standar, tergantung pada tujuan sosial yang relatif sesuai pada peristiwa tertentu. Terakhir adalah genre heterogeneti, atau poliponik, konsepsi ini melihat genre yang juga berhubungan dengan gaya, bentuk, suara juga gambar.

Dalam menganalisa wacana dalam sebuah teks, akan lebih mudah jika kita memberi nama untuk mengidentifikasi wacana yang bersangkutan. Ada dua isu agar dapat formulasikan peran hubungan sebuah wacana dalam suatu kontruksi sosial tertentu, wacana kongruen dan metapora.

Aplikasi kongruen adalah penggunaan sebuah wacana untuk meninjau seperangkat pengalaman yang biasanya paling sering muncul. Aplikasi metapora adalah perluasan sebuah wacana. Aplikasi yang terakhir ini dimotivasi secara sosial. Metapora yang berbeda bisa sajaberhubungan dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda serta idologi yang juga berbeda.

2.6 Framing

Salah satu pendekatan dalam analisa wacana adalah analisa framing. Analisa ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat dan untuk menggiring interpretasi sesuai dengan perspektifnya (Sobur, 2001 :162). Ada

dua model tentang perangkat framing yang sering digunakan sebagai metode framing. Pertama adalah model Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa setiap berita mempunyai frame sebagai pusat ide, frame tersebut dihubungkan oleh beberapa elemen dalam teks (Kosicki, 1993, dalam Sudibyo 1993 :39).

Model kedua adalah Gamson dan Modigliani yang dikembangkan berdasarkan pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media sebagai sebuah kemasan interpretative, yang didalamnya mengandung dua buah struktur, core frame, yang merupakan pusat organisasi elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang sedang di bicarakan. Struktur yang berikutnya adalah struktur condensing symbol yang mempunyai dua substruktur yaitu framing devices dan reasoning devices. Condensing symbol adalah hasil pencermatan terhadap interaksi dua substrukturnya. (Gamson dan Modigliani, dalam Siahaan, et al, 2001:87).

Analisa framing dapat dilakukan dalam dua pendekatan yaitu level cultural, meliputi identifikasi dan kategorisasi terhadap proses pengulangan, penempatan, asosiasi dan penjanaan kata, kalimat dan proposisi dalam suatu wacana dengan mengidentifikasi dan menganalisa kata kunci, metafor, frase, popular wisdom, silogisme dan perangkat – perangkat simbolik lain yang ada di dalamnya. Kedua adalah level individu, framing pada level ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman dan keberagaman schemata pekerja media, untuk

analisa framing perlu dilakukan sampai tingkat individual melalui polling atau wawancara. Framing di level ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keselarasan, atau frame resonance dalam istilah Gansome dan Modigliani, antara frame yang muncul dalam wacana tekstual dengan respon interpretative dari khalayak (Sudibyo, 1999 : 42).

2.7 Pemahaman Femenisme

Wacana fenimisme terasa kental dalam memproduksi teks pemberitaan tersebut. Menurut Maggie Humm, definisi fenimisme merupakan penggabungan doktrin hak – hak yang sama bagi perempuan (gerakan yang terorganisi untuk mencapai hak – hak wanita) dan suatu ideologi suatu tujuan transformasi sosial untuk menciptakan suatu keadaan persamaan.¹⁸

Sedangkan Endang Sumarini mengatakan, Feminisme berasal dari kata latin yang berarti memiliki sifat keperempuan (Hubies 1997:19). Dalam Inggris Indonesia ditemukan istilah *Feminisme* yang merupakan kata benda feminisme, keadaan kewanitaan. Dlam Kamus Besar Bhasa Indonesia, Feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.¹⁹

Dari kedua pengertian di atas, penulis beranggapan bahwa fenimisme adalah gerakan yang terorganisasi untuk menciptakan persamaan hak – hak wanita, fenimisme memiliki sifat keperempuannan atau keadaan kewanitaan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki – laki.

Endang Sumarni juga menjelaskan bahwa,”fenimisme diawali oleh perpepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki – laki dimasyarakat.

¹⁹ Ibid

Timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula kesetaraan hak perempuan dan laki – laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia. Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan fenimisme. Dalam prakteknya gerakan ini menghasilkan berbagai istilah kalangan akademisi seperti fenimisme liberal, fenimisme radikal, fenimisme sosial dan fenimisme teologi. Semua aliran fenimisme yang berbeda mempunyai perhatian yang sama yaitu ketimpangan posisi perempuan.²⁰

Gerakan fenimisme merupakan upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan sehingga gerakan ini menghasilkan berbagai istilah kalangan akademisi aliran fenimisme yang disebutkan di atas mempunyai perhatian yang sama walaupun dari bentuk yang berbeda. Fenimisme mengandung dua arti yang sangat penting, yaitu kesadaran dan perjuangan, sehingga dalam prosesnya menjadi sebuah ideologi atau gerakan (*movement*). A. Nunuk P. Muniarti berpandangan, ”Pada dasarnya, fenimisme adalah sebuah kesadaran tentang adanya ketidakadilan yang sistematis bagi perempuan diseluruh dunia”.²¹

Seperti dikutip A. Nunuk P. Muniarti, pengertian fenimisme menurut Nancy F. Cott mengandung tiga komponen penting yaitu, *Pertama*, suatu keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasar seks (*sex equality*), yakni menentang adanya posisi hierarkis diantara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya kualitas, tetapi mencakup juga kualitas. Posisi relasi hierarkis menghasilkan posisi *superior* dan *inferior*. Disini terjadi control dari kelompok *superior* terhadap kelompok *inferior*.

Kedua, suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi social yang merugikan perempuan. Relasi laki – laki dan perempuan yang ada di Semarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ditentukan oleh *nature* (kodrat ilahi). *Ketiga*, berkenaan dengan komponen kedua, adanya identitas dan peran gender. Sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat.²²

Dikatakan bahwa fenimisme menantang adanya perbedaan hak dan peran antara laki – laki dan perempuan yang didasarkan pada jenis kelamin (secara biologis) yang menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat dan menganggapnya sebagai kelompok *inferior* yang dapat dikontrol oleh kelompok

²⁰ Loc.cit h.58

²¹ . A. Nunuk P Murniati, *Getar Gender Buku Pertama: perempuan Indonesia dalam perspektif sosial*, Magelang, 2004

²² . Ibid h.xxvii

superior (laki – laki). Ben Agger menyebutkan beberapa alasan mengapa feminis menantang pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (seks) sebagai berikut:

Pertama, karena tidak ada alasan biologis mengapa perempuan harus mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga sementara laki – laki bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah, sehingga menjadikan sang istri tergantung kepada niat baik suami mereka demi kelangsungan hidup. *Kedua*, karena ini menyediakan satu model bagi devaluasi aktivitas perempuan di semua wilayah rumah tangga, politik, ekonomi, budaya.

Ketiga, menciptakan jalan bagi objektifikasi perempuan oleh laki – laki ... sebagai objek laki – laki di keluarga, yang bertindak baik sebagai pasangan pembantu maupun partner seksual, perempuan objektifikasikan di wilayah publik.. salah satu paradigma bagi objektivitasnya perempuan adalah degradasi fisik dan kultural perempuan oleh masyarakat yang mengizinkan untuk membawa perempuan ke dalam pandangan dan hasrat laki – laki demi kesenangan.²³

Sehingga menurut Agger, pembagian kerja berdasarkan seks bukan hanya melemahkan perempuan secara politis dan ekonomis, namun juga mendegradasikan perempuan secara seksual dan kultural. Lebih lanjut Agger mengatakan, “ prestasi utama teori feminis adalah menempatkan politik seksualitas sebagai isu sentral dalam pemahaman tentang penindasan.

Dapat disimpulkan bahwa penindasan terjadi akibat adanya perbedaan atau diskriminasi antara perempuan dan laki – laki berdasarkan jenis kelamin (seks) yang telah dikonstruksi secara sosial budaya. Fenimisme kemudian berusaha untuk membangun kesadaran dalam rangka memperjuangkan keadilan serta hak – hak perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

2.7.1 Aliran Feminisme Libral, Marxis-Sosialis, dan Radikal

a. Feminisme Libral

²³ .Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Perempuan dan Implikasinya*, Terjemahan Nurhadi, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003

Aliran feminisme liberal dipelopori oleh Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Aliran ini berasumsi dasar bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang dan serasi, sehingga tak layak jika terjadi penindasan satu dengan yang lainnya. Sekalipun demikian, aliran ini masih memandang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni yang berkaitan dengan fungsi reproduksi.

Fungsi organ reproduksi bagi perempuan tetap membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi tidak seharusnya menghalangi peran perempuan dalam masyarakat. Aliran ini menghendaki kesamaan peran laki-laki dan perempuan, baik dalam peran sosial, politik, maupun ekonomi.

Feminisme liberal lebih bergerak dalam usaha mengubah undang-undang dan hukum agama yang dianggap merugikan perempuan. Sebagai contoh, penggunaan undang-undang yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga.²⁴

b. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia. Tokoh-tokohnya antara lain, Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Asumsi dasarnya adalah bahwa ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Ia menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.

²⁴ . Siti Fatimah, *Tesis Kritik Filsafat Eko-Feminisme terhadap konsep kepemimpinan suami dalam keluarga*, Universitas Gajah Mada, 2002

Hampir sama dengan teori konflik, teori ini berpandangan bahwa posisi inferior perempuan terkait dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Ketimpangan gender terjadi karena akibat diberlakukannya sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam rumah tangga. Istri sangat tergantung pada suami dan mendukung kekuasaan suami.

Struktur ekonomi atau kelas dalam masyarakat sangat berpengaruh secara efektif pada status perempuan. Untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan agar seimbang dengan laki-laki perlu peninjauan ulang struktur secara mendasar, dan menghapus dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.

Kerangka dasar ideologi teori ini adalah menyoroti faktor seksualitas dan gender. Jadi, aliran feminisme Marxis-Sosialis ingin merombak segala sistem patriarki/hirarki dalam bidang sosial, kultural, dan politis²⁵

c. Feminisme Radikal

Aliran ini muncul di awal abad ke-19. isu besar yang diangkat adalah menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Kaum feminis radikal yang lebih ekstrim lagi, bukan hanya menuntut aliran ini perempuan bebas menentukan kehidupan seksnya. Karena keputusan seksual adalah masalah psikologis, maka untuk penyaluran kepuasan seks adalah tergantung mana yang diamati, mungkin perempuan atau laki-laki.

Namun ternyata, aliran feminis radikal yang ekstrim ini banyak mendapat tatangan luas bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga kalangan feminis yang lain. Pada intinya, semua aliran feminis yang telah dibahas tersebut memiliki visi misi yang sama,

²⁵ . Ibid Siti Fatimah

yaitu upaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status serta peran kaum perempuan ditengah kultur, norma, dan sistem patriarki.

Ada satu kesamaan umum dari teori-teori feminisme, yaitu mengenai asumsi yang dipakai tentang sistem patriarki. Asumsi feminisme mengenai ideologi patriarki adalah negatif, karena ideologi ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu tujuan para feminis adalah meruntuhkan struktur patriarki. Gerakannya dapat digolongkan menjadi dua pola umum.

Pertama, upaya melakukan transformasi sosial dengan perubahan eksternal yang revolusioner. Dalam kelompok ini para feminis berpendapat bahwa perempuan harus masuk ke dalam dunia laki-laki agar kedudukan dan statusnya sama dengan laki-laki. Oleh karena itu perempuan mengadopsi kualitas oleh filsafat eksistensialisme, bahwa tidak ada perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan

Kedua, melakukan transformasi sosial melalui perubahan yang evolusioner. Para feminis dalam kelompok kedua percaya pada pemahaman deterministik biologi. Perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan diakui, dan muncullah apa yang disebut kualitas maskulin dan feminim. Untuk meruntuhkan sistem patriarki dilakukan dengan memfungsikan kualitas feminin secara optimal, agar menjadi sistem matriarkis yang egaliter.

Feminisme yang berpandangan seperti ini disebut feminisme kultural, dan landasan teoritisnya adalah kualitas feminin, dan akhirnya menjadi ideologi matriarkhis. Kualitas matriarkhis ini dapat menggantikan sistem patriarkhis dalam relasi sosial.²⁶

2.8 Perbedaan Sex dan Gender

²⁶ . Loc.Cit, Siti Fatimah

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam kamus bahasa Indonesia berarti juga jenis kelamin²⁷. Lebih lanjut dikutip dari disertasi Nasarudin Umar, ia mengatakan jenis kelamin banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Studi jender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah jender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah jender.

Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender diartikannya sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.²⁸

²⁷ . John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1983

²⁸ Perpustakaan Wanita dan Anak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: *Pengantar Teknik Analisa Jender*, Jakarta, 1992

Tentang kenyataan akan adanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi efek perbedaan biologis terhadap perilaku manusia, khususnya dalam perbedaan relasi jender, menimbulkan banyak perdebatan, bahkan munculnya sejumlah teori sebagaimana akan dibahas secara khusus dalam uraian matang.

Perbedaan anatomi biologis dan komposisi dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Masih dalam kutipan disertasi Nasarudin Umar yang mengambil pernyataan Unger, misalnya, mengidentifikasikan perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Laki-laki (Masculine)	Perempuan (Feminim)
<ul style="list-style-type: none"> - Sangat agresif - Independen - Tidak emosional - Dapat menyembunyikan emosi - Lebih objektif - Tidak mudah terpengaruh - Tidak submissif - Sangat menyukai pengetahuan eksakta - Tidak mudah goyah terhadap krisis - Lebih aktif - Lebih kompetitif - Lebih logis - Lebih mendunia - Lebih terampil berbisnis - Lebih berterus terang - Memahami seluk beluk perkembangan dunia - Berperasaan tidak mudah tersinggung - Lebih suka berpetualang - Mudah mengatasi persoalan - Jarang menangis - Umumnya selalu tampil sebagai pemimpin 	<ul style="list-style-type: none"> - tidak terlalu agresif - tidak terlalu independen - lebih emosional - sulit menyembunyikan emosi - lebih subjektif - mudah terpengaruh - lebih submissif - kurang menyenangkan eksakta - mudah goyah menghadapi krisis - lebih passif - kurang kompetitif - kurang logis - berorientasi ke rumah - kurang terampil berbisnis - kurang berterus terang - kurang memahami selek beluk perkembangan dunia - berperasaan mudah tersinggung - tidak suka berpetualang - sulit mengatasi persoalan - lebih sering menangis - tidak umum tampil sebagai pemimpin - kurang rasa percaya diri - kurang senang terhadap sikap

<ul style="list-style-type: none"> - Penuh rasa percaya diri - Lebih banyak mendukung sikap agresif - Lebih ambisi - Lebih mudah membedakan antara rasa dan rasio - Lebih merdeka - Tidak canggung dalam penampilan - Pemikiran lebih unggul - Lebih bebas berbicara 	<ul style="list-style-type: none"> agresif - kurang ambisi - sulit membedakan antara rasa dan rasio - kurang merdeka - lebih canggung dalam penampilan - pemikiran kurang unggul - kurang bebas berbicara.²⁹
--	--

Kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan diatas dan menyebutkannya hanya sebagai bentuk streotip jender. Mereka membantah adanya skematisasi prilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

2.9 Jurnalisme Berspektif Gender

Jurnalisme berspektif gender adalah sebuah alternatif yang ditawarkan dalam maraknya penerbitan majalah perempuan yang cenderung stereotif, sekaligus banyak melontarkan kritik atas jurnalisme umum yang dianggap sering tidak sensitif gender. Lalau sebenarnya apa maksud dari jurnalisme berspektif gender, jurnalisme berspektif gender awalnya muncul karena adanya kesadaran bahwa perempuan dalam masyarakat masih menjadi warga kelas dua yang dalam segala aspek kehidupan ter subordinasi. Dan cara pandang inipun akhirnya dilestarikan oleh media.

Media sebagai cermin dari refleksi kondisi sosial budaya masyarakat sering meletakkan kecenderungan-kecenderungan masyarakat terhadap suatu peristiwa yang kian merugikan perempuan. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma tertentu, misalnya nilai-nilai patriarkis yang dimiliki masyarakat. dampak dari nilai-nilai patriarkis

²⁹ . Nasaruddin Umar, *Desertasi Perspektif Jender dalam al-quran*, IAIN 'Syarif Hidayatullah' Jakarta, 1999

biasanya tercermin dalam perspektif media pada saat menampilkan pemberitaan yang berkaitan dengan perempuan. Perempuan dianggap secara kodrat memang semestinya demikian. Disini terjadi kerancuan, dimana hal yang dinamakan kodrat yaitu yang dibawa sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi (jenis kelamin), atautkah pembagaian peran gender perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan masyarakat.

Jika pembagian gender tersebut adalah konstruksi masyarakat atau buatan manusia, maka sudah sewajarnya juga jika pembagian peran tersebut dapat diubah, atau bahkan direkonstruksikan. Tujuannya adalah untuk melahirkan pembagian yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga dapat menghindari persepsi gender yang tidak berimbang dalam media yang akan menimbulkan kerugian terhadap perempuan.

Secara sederhana jurnalisme berspektig gender diartikan sebagai praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik dalam media cetak (seperti dalam majalah, surat kabar dan tabloid) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender.

Ada dua hal yang seharusnya menjadi perhatian jurnalis jika ingin menampilkan pemberitaan atau tulisan yang berperspektif gender yakni, (a) bentuk ketidakadilan gender, dan (b) tempat dimana ketidakadilan gender tersebut terjadi. Pada yang pertama, biasanya kita melihatnya dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotipe atau label negatif terhadap kaum perempuan, kemudian beban kerja dan kekerasan serta keyakinan gender yang semakin memojokkan perempuan. Semuanya ini saling berkaitan dan menguatkan yang kemudian dilestarikan oleh ideologi budaya patriarki. Sementara untuk yang kedua kita memantaunya disetiap tingkatan. Mulai dari tingkat negara dan masyarakat, hingga budaya dan keyakinan, tempat kerja, rumah tangga dan pribadi³⁰.

Lebih lanjut, penulis melihat adanya keterkaitan jurnalisme berperspektif gender dengan pandangan kritis dalam berita seharusnya merupakan bentuk kekritisan penulis

³⁰ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (terjemahan)*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta 1996

dan pembaca didalam memperjungkan kesetaraan gender di masyarakat. paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. pada akhirnya posisi tersebut mempengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas sesungguhnya. Sesuai dengan pandangan kritis, jurnalisme berprespektif gender juga melihat berita bukan merupakan cerminan dan refleksi dari realitas, melainkan refleksi dari kepentingan dominan yang dalam hal ini telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Eriyanto dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan jurnalisme “netral/objektif” gender menggunakan paradigma pluralis, sedangkan pendekatan jurnalisme berperspektif gender menggunakan paradigma kritis. Sementara itu didalam jurnal Perempuan edisi 28 Maret 2003 yang ditulis Nur Iman Subono melengkapi pernyataan Eriyanto sebagai berikut mengenai jurnalisme Netral Gender dengan jurnalisme berperspektif gender.

FAKTA

Jurnalisme “Netral/Obyektif” Gender	Jurnalisme Berperspektif Gender
Terdapat fakta yang nyata dan ini diatur oleh hukum-hukum/kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal	Fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi-politik dan sosial-budaya yang ada dalam masyarakat
Berita adalah refleksi dari realitas sosial yang ada. Karenanya, berita harus bisa mencerminkan realitas yang diberitakan	Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksertaan dan ketidakadilan gender

Pada skema “fakta” terlihat jelas bagaimana kedua pendekatan tersebut melihat fakta yang harus diliput dan kemudian ditampilkan dalam tulisan atau berita. Pada yang pertama meyakini bahwa ada fakta yang bersifat obyektif di luar sana, dan ini yang

kemudian diliput oleh jurnalis dalam bentuk pemberitaan atau tulisan. Sebaliknya, pendekatan yang kedua menganggap bahwa apa yang disebut sebagai fakta itu adalah sesuatu yang semu sebagai hasil proses sosial politik dan ekonomi budaya yang dalam hal ini telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Fakta yang dilihat dari pendekatan jurnalisme netral atau objektif gender merupakan fakta dilihat yang sesuai dengan pluralis. Dalam pandangan kaum pluralis, berita adalah refleksi dan pencerminan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh kaum kritis, berita adalah hasil pertarungan wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan ideologi media.

POSISI MEDIA

Jurnalisme “Netral/Obyektif” Gender	Jurnalisme Berperspektif Gender
Media adalah sarana dimana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas netral dan setara	Mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan, maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok – kelompok yang marjinal (khususnya perempuan)
Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adanya.	Media adalah alat yang harus dimanfaatkan oleh kelompok – kelompok marjinal untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender

Pada skema “Posisi Media” terlihat bahwa pendekatan pertama meyakini sekali bahwa media adalah sarana yang bebas, netral atau tidak memihak dimana siapa saja bisa memanfaatkannya atau menyampaikan pandangannya dengan leluasa. Tapi sebaliknya sebagaimana sudah diungkapkan yang diyakini oleh pendekatan kedua, bahwa media adalah alat dari kekuatan dominan yang juga memproduksi ideologi yang dominan. Karenanya, sebagai titik baliknya, media justru harus bisa dimanfaatkan oleh kelompok –

kelompok marginal, khususnya perempuan, untuk mempersalahkan persoalan – persoalan perempuan dan sekaligus sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam pandangan kritis, media juga dipandang sebagai wujud dari pertarungan ideologi antar kelompok – kelompok yang ada dalam masyarakat. dalam hal ini media bukan merupakan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat secara apa adanya, melainkan kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.

POSISI JURNALIS

Jurnalisme “Netral/Obyektif” Gender	Jurnalisme Berperspektif Gender
Nilai atau ideologi jurnalis berada di luar proses peliputan atau pelaporan berita /peristiwa	Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa
Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang non-partisan dari kelompok – kelompok yang ada dalam masyarakat	Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisipan dari kelompok – kelompok marginal(khususnya perempuan yang ada didalam masyarakat)
Landasan moral	Landasan ideologis
Profesionalisme sebagai keuntungan	Profesionalisme sebagai kontrol
Tujuan peliputan dan penulisan; pemaparan dan penjelasan apa adanya	Tujuan peliputan dan penulisan; pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok – kelompok marginal terutama perempuan
Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran	Jurnalis sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas – kelas sosial

Pada skema “Posisi Jurnalis” ini terlihat perbedaan yang jelas dari dua pendekatan ini dalam hal bagaimana posisi dan peran jurnalis dalam menjalankan perannya. Bagi jurnalis yang berperspektif gender maka mereka tidak hanya bertindak sebagai jurnalis semata tapi juga berperan sebagai aktivis dengan ideologinya yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Tapi perlu digarisbawahi bahwa aktivis disini diimbangi

dengan sikap profesionalisme sebagai kontrol untuk menjaga kualitas dari pemberitaan atau tulisannya.

Peran dan posisi ini sebagai berlawanan dengan pendekatan pertama yang selalu menganggap bahwa nilai atau ideologi jurnalis tidak boleh ikut serta ketika melakukan peliputan atau penulisan berita

Salah satu perbedaan mendasar antara pandangan pluralis dan kritis ini adalah pada bagaimana wartawan dilihat, terutama bagaimana kerja profesional dari wartawan ini dipahami. Dalam pandangan pluralis wartawan fungsinya hanya pelapor. Sebagai pelapor ia hanya menjalankan tugas untuk memberitakan fakta, dan tidak diperkenankan munculnya pertimbangan moral atau nilai tertentu. Berita ditulis hanyalah untuk fungsi penjas dalam menjelaskan fakta atau realitas. Paradigma kritis justru menilai sebaliknya. Aspek ketika, moral, dan nilai – nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media.

HASIL PELIPUTAN/PEMBERITAAN

Jurnalisme “Netral/Obyektif” Gender	Jurnalisme Berperspektif Gender
Hasil liputan bersifat dua sisi atau dua pihak (seimbang – gender netral)	hasil liputan merefleksikan ideologi jurnalis yang bersperspektif gender
“Obyektif” – netral tidak memasukan opini atau pandangan subyektif	“Subyektif” karena merupakan bagian dari kelompok – kelompok marjinal yang diperjuangkan
Memakai bahasa “baku” yang tidak menimbulkan banyak penafsiran	Memakai bahasa yang sensitif gender dengan pemihakan yang jelas
Hasil peliputan bersifat eksplanasi, prediksi, dan control	Hasil liputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif, dan pemberdayaan sosial

Skema “Hasil Peliputan atau pemberitaan” nampak jelas perbedaan diantara kedua pendekatan tersebut. Pada pendekatan pertama, aturan main yang diajukan selalu berbunyi “both sides” pemberitaan dan bernuansa “obyektif”. Aturan main seperti ini ditolak oleh pendekatan kedua yang menganggap pentingnya ideologi jurnalis yang

berperspektif gender sebagai pegangan. Dengan demikian nuansa “subyektif jurnalis memang sangat terasa karena mereka merasa menjadi bagian dari perjuangan demi keadilan dan kesetaraan gender. Penggunaan bahasa pun sangat dijaga untuk tidak menggunakan kata – kata atau bahasa yang seksis atau bias-gender. Hasil liputannya bersifat kritis, transformatif dan emansipatif serta pemberdayaan sosial, khususnya perempuan. Hal ini berbeda secara berlawanan dengan pendekatan pertama yang hasil pemberitaanya lebih bernuansa eksplanansi, prediksi dan kontrol.

Dalam pandangan pluralis, bahasa jurnalis seharusnya adalah bahasa yang straight, langsung, tanpa opini dan penafsiran wartawan sehingga fungsi bahasa sebagai pengantar realitas terwujud. Sebaliknya, pandangan kritis memiliki konsepsi yang berbeda dalam memandang bahasa. Menurut pandangan kritis, bahasa selalu mengedepankan kelompok dominan dan mengusir kelompok marjinal. Oleh karena itu dalam pendekatan jurnalisme perperspektif gender, bahasa merupakan alat untuk menghasilkan liputan yang sensitif gender dan berpihak pada perempuan sebagai kelompok marjinal.

2.10 Majalah dan Produksi Teks

Majalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”merupakan terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan topik aktual yang patut diketahui konsumsi pembaca, artikel, sastra, dsb dan menurut kala penerbitannyadibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dsb dan menurut pengkhususnya isinya dibedakan atas majalah berita, wanita remaja, sastra, ilmu pengetahuan tertentu.dsb.³¹

³¹ . Tim Penyusun Kamus *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. 1989

Menurut ensiklopedi umum majalah merupakan bentuk penerbitan berkala, berbeda dengan surat kabar yang khususnya memuat berita tentang kejadian sehari – hari, yang memuat karangan – karangan berupa pembahasan yang ditulis untuk berbagai pengarang yang bertanggung jawab penuh atas karangannya itu. Jarak waktu penerbitan majalah lebih panjang dari pada surat kabar.³²

Sedangkan menurut Dja'far Assegaf, "Majalah merupakan publikasi terbitan secara berkala yang memuat artikel – artikel dari berbagai penulis. Lebih lanjut, Kurniawan Junaedhi menguraikan pengertian majalah

1. media cetak terbit secara berkala, tapi bukan terbit setiap hari.
2. media cetak bersampul, setidaknya punya wajah, dan dirancang secara khusus.
3. media cetak yang dijilid atau sekurang – kurangnya memiliki halaman tertentu.
4. media cetak yang berformat sebagaimana format majalah yang kita kenal selama ini.³³

Dari pendapat penulis menyimpulkan, majalah merupakan media cetak yang bersampul, dijilid dalam bentuk buku yang berisi berita, artikel – artikel dari berbagai penulis, dan diterbitkan secara berkala, bisa seminggu sekali, seminggu dua kali, atau satu bulan sekali. Dikaitkan dengan masalah penelitian, maka Majalah Aulia merupakan media cetak yang memiliki sampul, berjilid, berisis berita – berita, artikel yang terbit secara berkala, yaitu satu bulan sekali. Menurut Elvirano Ardianto memberikan batasan mengenai karakteristik majalah yaitu:

- Penyajian Lebih Dalam

Berita dalam majalah disajikan lebih lengkap karena dibubuhi latar belakang peristiwa. Sehingga pembaca dapat mengetahui awal permasalahan yang dibahas dalam majalah tersebut. Unsur why menjadi unsur yang penting dan unsur how lebih rinci karena menceritakan kronologis cerita.

- Nilai Aktualitas Lebih Lama

Dibandingkan dengan surat kabar, dalam hal ini majalah lebih unggul. Kalau surat kabar, aktualitas hanya sehari. Bila ada kejadian terbaru maka berita kemarin sudah basi (tidak aktual lagi), namun tidak begitu dengan majalah, nilai aktualitasnya bisa mingguan bahkan bulanan.

- Gambar atau Foto lebih banyak

³² . Shadlly, Hasan, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1984,

³³ . Kurniawan Junaedi, *Rahasia Dapur Majalah Indonesia*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. 2000

Halaman majalah lebih banyak dibandingkan surat kabar, kekuatan majalah juga terletak dari gambar atau foto yang bagus. Kertas yang dipakai juga lebih bagus.

- Cover sebagai daya tarik

Banyak orang yang tertarik karena melihat tampilan luarnya. Cover dalam majalah biasanya berisis berita utama yang sedang diangkat pada edisi tersebut.

Dari uraian diatas penulis memahami bahwa penyajian majalah yang lebih mendalam menghasilkan informasi yang lebih lengkap untuk disampaikan kepada pembaca. Mengenal nilai aktualitas, majalah mampu mengemas suatu berita yang dapat dikatakan bukan berita baru menjadi suatu permasalahan yang layak untuk diperbincangkan kembali.

Teks yang di produksi oleh majalah Figur merupakan sebuah penilaian hasil konstruksi dalam kekuasaan yang terselundupkan nilai – nilai ideologi media yang terefleksikan. Sehingga teks pemberitaan tersebut mengarah pada makna wacana gerakan fenimisme. Penggunaan bahasa pada teks suatu media mempengaruhi bentuk dari keseluruhan wacana. Bagaimana wacana yang dikembangkan media tergantung pada unsur ideologi di media tersebut.

Teks memiliki tiga fungsi utama yaitu ideational, bahwa teks mengandung sistem pengetahuan dan kepercayaan. Fungsi kedua adalah interpersonal yaitu adanya hubungan sosial dan identitas sosial, terakhir adalah tekstual. Berhubungan dengan fungsi tersebut maka dalam teks biasanya adanya tiga hal yang ditekankan; adanya reperentasi atau rekonstruksionalisasi tertentu dari praktek sosial seperti ada tau tidaknya ideologi tertentu dalam teks. Selanjutnya adalah konstruksi tertentu dari identitas penulis atau pembaca. Hal ketiga yaitu kontruksi tertentu dari hubungan antara penulis dan pembacanya³⁴

Untuk membongkar muatan – muatan ideologi dalam sebuah teks dan bahasa penulis menggunakan metode pendekatan analisis wacana. Menurut Eriyanto, “analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa : batasan – batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan.”³⁵

Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana, positivisme, empiris,

konstruktivisme, kritis,. Seperti telah dijelaskan pada awal bab ini, pandangan kritis hadir

³⁴ . Norman Fairclough, *Media Discourse*, London; Edwar Arnold, 1995

³⁵ . Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Lkis, Yogyakarta, 2005

untuk mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional.

A.S Hikam menyebutkan seperti dikutip Eriyanto, “pandangan konstruktivitas masih belum menganalisis faktor – faktor hubungan kekuasaan yang intern dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis – jenis subjek berikut perilaku – perilakunya.³⁶ Hal ini yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana tidak dipusatkan kepada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada analisis konstruktivisme.

Bahasa dalam paradigma kritis dipahami sebagai perwakilan yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema – tema, wacana tertentu, maupun strategi – strategi didalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa – kuasa di dalam proses bahasa.

Dengan pandangan semacam ini wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam menentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena dalam analisis wacana ini menggunakan perspektif kritis, analisis wacana ini disebut analisis wacana kritis. Menurut Eriyanto mengutip pendapat Fairclough dan Wodak, “analisis wacana kritis melihat wacana dan pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial.³⁷

2.6 Pemahaman Ekonomi Media Majalah

³⁶ . Ibid. h.10

³⁷ . loc.cit h.7

Media massa sering kali hanya dipandang sebagai institusi sosial, politik, dan budaya belaka. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini memperlihatkan media tidak lagi dilihat semata-mata sebagai institusi sosial dan politik, melainkan juga sebagai institusi ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa media telah tumbuh bukan saja sebagai alat penyampaian pesan-pesan sosial, politik dan budaya, tetapi juga sebagai perusahaan yang menekankan keuntungan ekonomi.

Jurgen Habermas, menyebutkan media sebagai institusi sosial-politik sekaligus sebagai institusi ekonomi. Sebagai institusi sosial politik, media berupaya menjabarkan publik dalam menyampaikan aspirasi sosial-politik mereka terhadap penguasa dan kekuasaan. Sebagai institusi ekonomi, media bekerja berdasarkan rasionalitas ekonomi atau bisnis, yakni mencari keuntungan³⁸

Denis McQuail, menyebut fenomena media massa modern ini sebagai dwi-karakter media atau karakter ganda media. McQuail lebih jauh menyebut media memiliki dwi karakter yang tak terpisahkan: karakter sosial, budaya, politik dan karakter ekonomi. Denis McQuail, selanjutnya mengajukan 10 prinsip yang menunjukkan media sebagai institusi ekonomi. *Pertama*, media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur *fixed* dan *variabel cost*. *Kedua*, pasar media mempunyai karakter ganda: dibiayai oleh konsumen dan atau oleh para pengiklan.

Ketiga, media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal yang tidak diinginkan. *Keempat*, media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan jangka pendek. *Kelima*, perbedaan utama dalam penghasilan media akan menuntut perbedaan ukuran kinerja media. *Keenam*, kinerja media dalam suatu pasar akan berpengaruh pada kinerja ditempat lain (pasar lain).

³⁸ . Jurgen Habermas, *The Theory of Communication Action*, Boston: Beacon Press, 1989

Ketujuh, ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah homogenitas program media. *Kedelapan*, iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara. *Kesembilan*, jenis iklan tertentu menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan khalayak. *Kesepuluh*, persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman.

Selain itu, menurut McQuail, faktor ekonomi malah menjadi penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku media massa modern. Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa membentuk faktor persaingan. Tuntutan ekonomi kini menjadi pertimbangan bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola³⁹

Didalam pasar majalah terdiri atas oplah penjualan dan iklan. Pasar majalah dapat dibagi kedalam sejumlah sub pasar, seperti pasar untuk majalah spesialis, misalnya majalah bisnis, majalah perempuan, majalah politik dan lainnya. Disamping itu kita juga dapat membaginya dari sisi waktu terbitnya apakah bulanan, dwibulanan, atau mingguan. Bagaiman dengan ekonomi media yang dilakukan Majalah Figur? Didalam prosesnya, majalah Figur memperoleh pendapat melalui oplah penjualan, iklan, dan pembicara yang ditampilkan secara eksklusif.

Maka kerap kali majalah ini disebut majalah “narsis” bagi mereka yang ingin dipublikasikan secara eksklusif. Sebagai media yang sudah 6 tahun berdiri, strategi ini dianggap paling banyak menghasilkan keuntungan. Mereka yang sering tampil eksklusif kebanyakan anggota legislatif dan menteri yang ditampilkan sebagai cover depan ataupun halaman dalam. Biasanya mereka mau ditampilkan sesuai dengan judul berdasarkan perwakilan komisi di DPR RI, selain itu unsur publikasi ke publik dirasakan efektif dengan tampil di majalah ini.

³⁹ . Usman Ks, *Ekonomi Media, Pengantar Konsep dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2009

Memang untuk masa depan penerbitan majalah akan menghadapi tantangan untuk mempertahankan pembaca dan iklan serta mengontrol pengeluaran. Penerbit majalah juga harus mulai memasuki pasar dengan teknologi baru dan menjajaki kemungkinan mendistribusikannya secara internasional. Industri majalah bersaing dengan industri majalah lainnya serta televisi terrestrial dan televisi kabel. Dimasa mendatang, majalah spesialis akan lebih menarik perhatian pengiklan.

Oleh karenanya perspektif ekonomi media, dalam media massa merupakan kompetisi didalam memperebutkan pasar. Pasar media adalah khalayak pengiklan. Dengan begitu, dalam perspektif ekonomi media, media massa bersaing memperebutkan khalayak dan pengiklan. Dilihat dari perspektif ekonomi media, derajat kompetisi bisa dilihat dari konsentrasi pasar dan konsentrasi kepemilikan. Media yang pasarnya relative sejenis akan berkompetisi secara ketat.

Majalah Figur dan Majalah Parlemen (majalah internal DPR) bersaing secara ketat karena mereka membidik pembaca dan pengiklan yang relatif sama. Untuk mengurangi derajat persaingan, media biasanya memperluas pasar. Misalnya Majalah Figur, melakukan penjualan di luar parlemen dengan melakukan peredaran penjualan di wilayah tertentu di toko buku gramedia dan gunung agung, selain itu saat ini di beberapa instansi pemerintahan sudah banyak yang berlangganan. Selain itu segmentasi pembicaranya di perluas pada pengamat dan juga akademisi.

2.7 Politik Pencitraan

Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membangun citra politik yang baik bagi khalayak. Citra politik itu terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang kita

terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.

Citra politik juga berkaitan dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum politik terbangun melalui citra politik. Sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik⁴⁰. Roberts dalam buku Anwar Arifin menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, dan citra itulah yang mempengaruhi pendapat atau perilaku khalayak. lebih lanjut citra politik dapat dirumuskan sebagai suatu gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik dan konsensus) yang memiliki makna, kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik sebenarnya. Citra politik tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang gejala politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan penghargaan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum⁴¹.

Selain itu Dan Nimo berpendapat citra politik seorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik. Citra politik juga membantu bagi seorang dalam memberikan alasan yang dapat diterima secara subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya tentang preferensi politik.

Citra politik akan menjadi perhatian penting jika seorang menganggap, bahwa dalam memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis, hanya dapat diatasi dan dilakukan oleh negara. Orang bertukar citra politik melalui komunikasi politik sebagai

⁴⁰ . Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik, Strategi Pemenangan Pemilu dalam Perspektif Komunikasi Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006

⁴¹ . Ibid Anwar Arifin

cara untuk menyelesaikan konflik dan mencari konsensus dalam upaya manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Penulis memahami, apa yang ditampilkan Majalah Figur didalam rubrik sosok ataupun halaman cover merupakan salah satu pencitraan yang dilakukan anggota legislatif. Karena itu pemberian nama, gambar, dan aktivitas seorang politikus ditonjolkan dalam media massa, maka politikus tersebut memperoleh reputasi yang tinggi di dalam masyarakat. Penonjolan itu juga memberikan citra politik yang baik bagi politikus tersebut. Hal ini berlaku juga bagi lembaga, partai politik, tempat, dan topik tertentu.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa berita politik, tentang tokoh politik, partai politik dan kebijakan politik dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan citra politik yang berbeda bagi masing-masing orang. Selain itu media massa dari perspektif komunikasi politik, bukan saja cermin masyarakat politik yang *ambigu*, tetapi media massa juga dapat disebut sebagai cermin masyarakat politik yang retak, karena tidak mampu merefleksikan seluruh realitas politik yang ada dalam masyarakat secara menyeluruh, tepat dan benar. Berita media massa hanyalah merupakan mosaik dari kepingan-kepingan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2.8 Kerangka Pemikiran

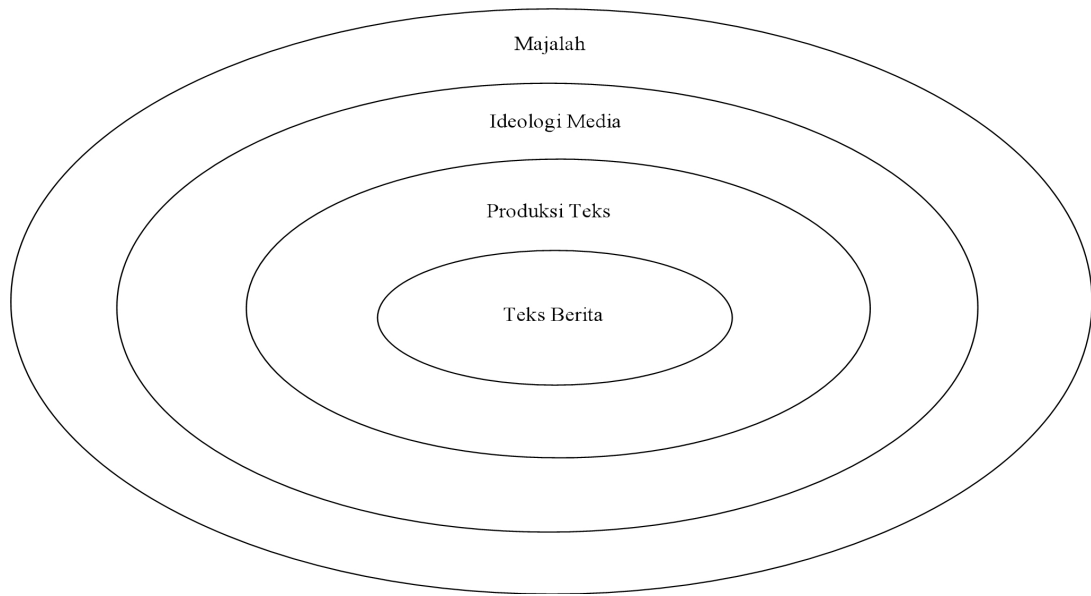
Dalam merumuskan kerangka pemikiran, penulis menggunakan lingkaran oval, karena dalam pembacaan teks dan memakainya tidak ada ukuran yang baku. Pemaknaan sendiri tidak terkait hanya suatu pemahaman namun terus berkembang sesuai dengan interpretasi seseorang. Dalam kerangka pemikiran tersebut, penulis membuat empat

lingkaran oval untuk menggambarkan pola konstruksi ideologi mengenai pemberian feminisme di Indonesia di Majalah Figur.

Pada lingkaran oval yang paling luar menjelaskan majalah sebagai media, sedangkan oval yang kedua menjelaskan tentang ideologi media, dimana sebuah ideologi berperan dalam suatu produksi teks hingga tersusunnya sebuah teks berita. Sedangkan pada lingkaran oval selanjutnya adalah produksi teks yang merupakan bagian penting dari teks berita yang memberikan pengaruh hingga terbentuknya sebuah teks berita dan menjelaskan wacana yang diangkat oleh majalah tersebut.

Pada lingkaran oval yang paling dalam menjelaskan teks berita yang merupakan hasil konstruksi ideologi yang diwujudkan dalam sebuah teks sehingga menghasilkan wacana. Sedangkan pada lingkaran oval kedua adalah produksi teks yang merupakan bagian penting dari teks berita yang memberikan pengaruh hingga terbentuknya sebuah teks berita. Yang terakhir bagian lingkaran oval paling luar adalah ideologi media, dimana sebuah ideologi berperan dalam suatu produksi teks hingga tersusunnya sebuah teks berita.

Dalam bagian kerangka pemikiran penulis memposisikan dirinya diluar bagan tersebut untuk melihat teks yang dihasilkan media berdasarkan latar belakang sosial budaya media tersebut. Yang merupakan hasil interaksi awak media dengan dinamika masyarakat. dengan demikian media dalam mengkonstruksikan ideologi yang ditampilkan dilihat dengan menggunakan analisis wacana kritis.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada artikel berita Majalah Figur, dengan cara berlangganan tiap awal bulannya dan datang ke Redaksi Majalah Figur. Adapun Majalah Figur sendiri beralamat di Jalan Kalibata Tengah No 1A, Jakarta Selatan. Hal yang melatar belakangi pemilihan Majalah Figur sebagai objek penelitian adalah adanya perbedaan didalam proses penulisan artikel Majalah Figur dan yang lainnya. Majalah Figur lebih kearah isu aktual dengan narasumber sebagai penceritanya dan dikaji dari halaman pertama hingga akhir.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sejak awal bulan Juni 2010 (Sejak awal pemilihan judul mata kuliah Riset Komunikasi). Penulis memikirkan permasalahan apa yang akan diangkat untuk dijadikan persoalan didalam penelitian. Hingga penulis memutuskan untuk meneliti persoalan Feminisme dunia politk didalam artikel Majalah Figur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir mengungkapkan, ‘metodologi kualitatif menuntut adanya rancangan penelitian yang mespesifikan objeknya secara eksplisit dieliminasiakan dari objek – objek lain yang tidak diteliti.⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memahami bahwa metodologi kualitatif mulai dengan penetapan objek studi yang spesifik, dieliminasiakan dari totalitas atau

⁴² . Noeng Muhadir, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000,

konteks besarnya, sehingga eksplisit jelas objek studinya. Disusun kerangka teori sesuai dengan objek studi spesifiknya. Dari situ ditelorkan hipotesis atau problematik penelitian, instrumentasi pengumpulan data, dan data teknik sampling serta teknik analisisnya.

Bagdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai :

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kenyataan.⁴³

Dari pernyataan di atas, peneliti memahami bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Untuk meneliti dokumen surat Kartini maka dapat dilihat dari pemberitaan mengenai feminisme di Indonesia, menggunakan metode analisis isi kualitatif.

Menurut Burhan Bungin, analisis ini tidak hanya mampu mengidentifikasi pesan – pesan manifest, melainkan juga pesan laten dari sebuah dokumen yang diteliti.. kedalaman analisis ini media secara kualitatif akan lebih mendalam dan detail dalam memahami produk isi media dan mampu menghubungkan dengan sosial atau realitas yang terjadi.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa analisis isi kualitatif tidak hanya dapat mengidentifikasi pesan yang tertulis dari sebuah media akan tetapi juga pesan tersembunyi sehingga analisis isi secara kualitatif ini bukan hanya sekedar tahu

⁴³ . Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

⁴⁴ . Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

tetapi juga dapat memahami produk isi media dengan mendalam dan detail. Analisis isi tersebut juga mampu menghubungkan realitas yang terjadi dengan konteks sosial.

Burhan Bungin menambahkan kembali bahwa analisis media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya... dalam analisis isi kualitatif ini, semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah teks apapun bentuknya gambar, tanda (sign), simbol, gambar bergerak dan sebagainya.

Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa analisis isi kualitatif dapat dipakai untuk meneliti sebuah media yang dapat berupa teks, gambar atau simbol – simbol lainnya.

3.2 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma kritis. Teori kritis lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis teori kritis tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidak benaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada konstruktivisme. Analisis kritis menekankan pada konstruktivisme kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat⁴⁵.

Oleh karena itu, analisis ini dipakai untuk proses komunikasi: batasan-batasan apa yang diperkenankan, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang

⁴⁵ . Elvinaro Ardianto dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung 2009

dibicarakan. Inti dari aliran ini terutama adalah kepercayaan bahwa masyarakat adalah wujud dari konsensus dan mengutamakan keseimbangan. Masyarakat dilihat sebagai suatu kelompok yang kompleks dimana terdapat berbagai kelompok sosial yang saling berpengaruh dalam situasi sistem dan pada akhirnya mencapai keseimbangan.⁴⁶

Sebagai konsekuensi dari teori kritis yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, maka metode yang digunakan juga harus menggunakan paradigma kritis. Eriyanto menjelaskan, dalam penelitian kritis, tidak dapat dihindarkan unsur subjektifitas. Ketika menafsirkan suatu teks, pengalaman, latar belakang budaya peneliti, pendidikan, aviliasi politik bahkan keberpihakan mempengaruhi hasil interpretasi⁴⁷.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis memahami bahwa seorang peneliti bersifat sibjektif dalam melakukan penelitian kritis. Karena dalam salah satu sifat analisis kritis menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai ketika memandang suatu penelitian. Sehingga paradigma kritis akan menempatkan etika atau norma-norma sebagai dasar keberpihakan penelitiannya. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan Stuart Hall yang dikutip oleh Eriyanto, “peneliti seperti layaknya seorang aktivis yang mempunyai komitmen nilai-nilai tertentu yang harus diperjuangkan⁴⁸

Analisis wacana kritis melihat faktor bahasa sebagai elemen penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarat. Analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saling bertarung dan mengajukan versinya masing – masing.

Eriyanto mengatakan ada lima ahli yang melahirkan pemikiran penting dalam mengelaborasi konsep wacana umum untuk melihat bagaimana teks berita harus dianalisis. Lima pemikiran penting itu di antara lain, Roger Fowler dkk, Theo Van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. Van Dijk dan Norman Fairelough. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, penulis menggunakan analisis wacana kritis dengan model analisis yang dikemukakan Teun A. van Dijk. Masalah penelitian ini erat kaitannya dengan ideologi produksi teks di majalah Figur.

⁴⁶ . Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LkiS, Yogyakarta, 2001

⁴⁷ . Ibid Eriyanto

⁴⁸ . Loc.cit Eriyanto

3.3 Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Analisis wacana merupakan sebuah analisis isi kualitatif. Menurut Alex Sobur ada empat karakteristik dalam pendekatan analisis wacana antara lain:

Pertama, dalam analisisnya analisis wacana lebih bersifat kualitatif. Analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks ketimbang penjumlahan unit seperti dalam analisis isi. Dasar analisis wacana adalah interpretasi karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretif yang mengandalkan penafsiran dan interpretasi peneliti.

Kedua, analisis wacana memfokuskan pada muatan laten (tersembunyi). Maka suatu pesan dengan demikian tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai apa yang tampak nyata dalam teks, namun harus dianalisis dari makna yang tersembunyi.

Ketiga, analisis wacana bukan hanya kata atau aspek isi lainnya dapat dikodekan, tetapi struktur wacana yang kompleks pun dapat dianalisis pada tingkat deskripsi. *Keeempat*, analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi⁴⁹

Dari penjelasan diatas, penulis berkesimpulan dengan pendekatan analisis wacana bersifat kualitatif, penafsiran atau interpretasi peneliti sangat diandalkan, karena dalam analisis wacana menitikberatkan pada muatan yang tersembunyi, artinya dalam menafsirkan makna suatu pesan bukan hanya yang tampak nyata dalam teks tetapi juga makna yang tersembunyi.

Lalu didalam kerangka berfikir van Dijk, kalau suatu teks mempunyai ideologi tertentu atau kecendrungan pemberitaan tertentu, maka itu berarti menandakan dua hal.

Pertama, teks tersebut merefleksikan struktur model mental wartawan ketika memandang suatu peristiwa atau persoalan. Kalau suatu teks bias gender, bisa jadi wartawan yang menghasilkan teks tersebut mempunyai pandangan yang bias gender. *Kedua*, teks tersebut merefleksikan pandangan sosial secara umum, skema kognisi masyarakat atas

⁴⁹ . Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2002

suatu persoalan. Katakanlah kalau suatu teks bias gender, kemungkinan itu juga merefleksikan wacana masyarakat yang memang bias gender.

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Maka dari itu penulis pun memahami dengan model tabel yang akan merujuk pada penelitian nantinya:

Level Analisis	Jenjang Pengamatan	Metode
Teks	Bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tersebut.	Menganalisa isi/content berita pada Majalah Figur
Kognisi Sosial	Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan.	Wawancara mendalam pemimpin redaksi Majalah Figur
Konteks Sosial	Mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah	Wawancara mendalam politik perempuan anggota DPR RI

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka peneliti didalam level Teks mencoba melihat isi/content yang diproduksi Majalah Figur melalui analisis wacana. Sedangkan pada level Kognisi Sosial penulis akan mencoba mewawancarai pemimpin redaksi Majalah Figur Dedi Irawan terkait proses penetapan judul pada sidang redaksi Majalah Figur, kenapa mau mengangkat politik perempuan dalam edisi April 2008 dan 2010. Pada level analisis sosial, penulis akan mencoba mewawancarai politik perempuan dari Fraksi Golkar Nurul Arifin atau Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, yang akan ditanyai seputar feminisme di dunia politik.

3.4. Unit Analisa

Menurut Jalaluddin Rakhmad, “ Bagian yang diamati itu disebut sampel, sedangkan kumpulan objek penelitian disebut populasi. Jalaludin menambahkan, “objek penelitian dapat berupa orang... organisasi, kelompok, lembaga, buku, kata – kata , surat kabar, dan lain – lain. Dalam penelitian ini disebut unit analisis (*unit of analysis*)⁵⁰

Bila pendapat di atas dikaitkan dengan penelitian penulis maka populasi dari peneltian ini adalah Majalah Figur . Karena majalah tersebut terbit tiap sebulan sekali dan setiap bulan mengangkat topik – topik yang berbeda – beda.

Sampel penelitian ini adalah keseluruhan berita yang berkaitan dengan fenimisme di indonesia di Majalah Figur. Penulis mengambil beberapa sampel yang terdapat pada edisi April 2008 dan April 2010. Semua data itu terkait dengan pemberitaan fenimisme di dunia politik di analisis sesuai dengan perangkat analisis wacan kritis model Teun A. van Dijk.

Untuk itu unit analisis dalam penelitian ini adalah teks dan paragraf berita yang terdapat sepuluh tema berita dengan judul sebagai berikut:

1. Partisipasi Politik Perempuan Rendah!
2. Mendorong Optimalisasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik
3. Kebijakan Pengarusutamaan Gender Jalan di Tempat?
4. 30 Persen Buakan Datang Dari Langit
5. Pengarusutamaan Gender Memperhatikan Keadilan dan Keadilan.
6. Sejarah Panjang Perempuan Berpolitik
7. Peluangnya Ada, Tinggal Komitmen Saja
8. Sistem Suara Terbanyak, *Fair* Bagi Perempuan

⁵⁰ . Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999

9. Tantangan Perempuan Berpolitik
10. Berharap Belas Kasihan? Maaf Saja

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar adalah, “Usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.” Dari pendapat tersebut, penulis memahami bahwa teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin untuk melengkapi penelitian. Seperti juga dalam teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dilakukan secara bertujuan, berarti hanya data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan digunakan.

Seluruh sampel penelitian yang berkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk. Setelah itu, penulis juga akan mewawancarai pihak Majalah Figur, dalam hal ini redaksional Majalah Figur untuk menjawab pertanyaan seputar feminisme di dunia politik serta persoalan pemilihan tema dalam sidang redaksi Majalah. Wawancara ini sebagai usaha dalam mengumpulkan data sehingga akan diketahui sejauhmana pihak yang di wawancarai tentang kebenaran, kenyataan, dan fakta dengan konstruksi realitasnya mengenai feminisme di dunia politik pada pemberitaan di Majalah Figur yang dianalisis penulis.

3.6 Key Informasi

Majalah Figur adalah majalah yang terbit setiap bulan dengan tiras 10.000 eksemplar dan akan ditingkatkan sampai dengan 20.000 eksemplar. Sedangkan majalah

ini mengarahkan pada target pembaca kalangan Pengambil Kebijakan baik level Pusat maupun daerah, Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta kalangan Cendekiawan maupun Masyarakat Umum.

Untuk profil pembaca mulai dari Mahasiswa sebanyak 5 persen, Wiraswasta sebanyak 30 persen, BUMN/BUMD sebanyak 10 persen, Profesional sebanyak 20 persen, dan PNS/TNI/Polisi sebanyak 35 persen. Sedangkan untuk pembaca dari 20 – 29 tahun sebanyak 10 persen, 30 - 39 tahun sebanyak 30 persen, 40 – 49 tahun sebanyak 35 persen, dan usia 50 – 59 tahun sebanyak 20 persen.

Majalah Figur menyajikan berbagai informasi berkenaan dengan kebijakan Politik, Hukum, Hankam, Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diekspos secara mendalam dan menyeluruh dengan menyoroti tokoh atau figur yang menjadi pelaku dan sorotan dari berbagai pihak yang berkompeten. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau analisisnya.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada:

4.1 Analisis Data Teks

4.1.1 Dalam analisis teks yang dilakukan oleh penulis, secara teks penulis merujuk pada suatu model tertentu yaitu model pembedahan teks Teun A. Van Dijk, dimana penulis mencoba menganalisa teks yang dibuat oleh media berdasarkan pedoman yang ditentukan dalam model tersebut.

4.1.2 data utama yang menjadi pembahasan penulis didalam membedah isi teks artikel majalah Figur dan Femina tentang politik perempuan, edisi perempuan bulan April 2010, dengan model analisis wacana kritis Teun A Van Dijk

4.2 Wawancara Key Informan

4.2.1 Wawancara ini akan melibatkan langsung tokoh politik perempuan di DPR RI dan masing-masing Pemimpin Redaksi Majalah Figur dan Femina. Hal ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang mendalam mengenai hasil isi penelitian yang peneliti tulis.

a. Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh,SH,MA (Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur)

b. Dedi Irawan, S.IP, M.Si (Pemimpin Redaksi Majalah Figur)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan key informan, penulis mencoba bertanya kepada mereka mengenai pemahaman feminisme secara umum dan peran perempuan didalam pemberitaan media massa, semua ini dilakukan untuk membongkar

dari semua hal yang berkaitan dengan perjalanan perempuan berpolitik. Termasuk menanyakan hal ini langsung kepada anggota legislator perempuan yang masih aktif sebagai anggota DPD RI.

4.3 Model Analisa Teks

Dalam model analisa ini, penulis mencoba menggambarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan analisa wacana kritis Teun A Van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN
Struktur Makro	Tematik Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Superstruktur	Skematik Bagimana bagian dan urutan berita dikemukakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditentukan dalam teks berita. Misal dengan memberi detail pada satu sisi atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail sisi lain	Latar, Detail, Maksud, peranggapan, Nominalisasi
Struktur Mikro	Sintaksis Bagimana kalimat (bentuk, susunan) yang dipilih.	Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti
Struktur Mikro	Stilistik Bagaimana pilihan kata	Leksikon

	yang dipakai dalam teks berita	
Struktur Mikro	Retoris Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, Metafora, Ekspresi

Matrik Pemberitaan Artikel Majalah Figur dan Femina

Judul : Peluangnya Ada, Tinggal Komitmen Saja
Media : Majalah Figur
Edisi/Bulan/Tahun : XLVIII/April/2010
Halaman : 12 – 13
Narasumber : Andi Timo Pangarang (Anggota Komisi VII DPR RI)
Oelfah D. Harmanto (Anggota Komisi VII DPR RI)
Endang Agustini Syarwan Hamid

1. Tematik

Dalam isi artikel yang ditampilkan Majalah Figur, wartawan mencoba memberikan gagasan inti yang ditulis diawal permulaan tulisan. Wartawan mencoba menyampaikan makna UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang harus menyantumkan 30 persen keterwakilan perempuan. Dimana wartawan mencoba memberi dorongan kepada perempuan agar memanfaatkan momentum ini. Paragraf 2 dan 3 *“Beberapa paket undang-undang politik yang memberikan harapan besar bagi upaya untuk memaksimalkan peran perempuan dalam bidang politik, seolah berlomba bermunculan. Salah satunya terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mewajibkan parpol menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai pengurusan partai sebagaimana tertuang pada pasal 2 ayat (2). Parpol diharapkan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik dengan cara memberikan kesempatan untuk terjun langsung di bidang politik dan meningkatkan kualitas serta*

memberikan pendidikan politik kepada perempuan yang ada di partai politik.” (Paragraf 2). Wartawan dalam hal ini hanya mengingatkan kepada parpol, bahwa keterkaitan perempuan didalam politik hukumnya wajib, akan tetapi peran serta yang diberikan parpol kepada wanita belum sepenuhnya mendukung UU No. 2 Tahun 2008 tentang jumlah perwakilan perempuan yang belum bisa mencapai angka 30 persen.

“Untuk itulah, kaum perempuan harus menangkap peluang tersebut dengan cara lebih memiliki komitmen yang jelas mengenai politik dan memperdalam pengetahuannya. Dengan demikian, anggapan selama ini mengenai politik dan memperdalam pengetahuannya. Dengan demikian, anggapan selama ini mengenai ketidakmampuannya dapat ditepis, mengingat ada kesan dari masyarakat bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga.” (Paragraf 3). Penulis menilai, kini saatnya bahwa perempuan harus menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada laki-laki, selain itu terus dukung program perempuan agar mereka bisa mewakili kaum yang dibela. Sehingga pelan-pelan hal ini akan memberikan hal positif untuk mencapai kuota perempuan hingga 30 persen di parlemen.

2. Skematik

Pada awal penulisan wartawan mencoba menuliskan betapa tertutupnya hak berpolitik peran perempuan dimasa orde baru, lalu diceritakan bagaimana peranan perempuan berpolitik pasca orde baru yang membuat kaum perempuan bernafas lega karena terlepas dari masa orde baru. Dijelaskan pada paragraf 1 *“Setelah sekian lama hak berpolitik ‘terpasung’, seakan ini kaum perempuan sudah bisa bernafas lega. Di era reformasi, pemerintah bersama DPR telah melakukan reformasi di bidang politik terkait*

dengan kebebasan berpolitik warga negara, termasuk kaum perempuan” Disini perempuan mencoba memaksimalkan peran perempuan untuk memaksimalkan peran perempuan dalam bidang politik.

Pada isi penulisan, wartawan mencoba merangkai tulisan yang diberikan kepada narasumber untuk memperkuat ‘argument’ penulis di awala tulisan. Hal ini diungkapkan diawal pembicaraan oleh Andi Timo Pangarang “....*bahwa perwakilan perempuan itu mengalami peningkatan dibandingkan periode yang lalu dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi yang bagus, dimana pada periode 2004-2009 hanya sekitar 11 persen, sedangkan ditahun 2009-2014 sekitar 18 persen. Namun dibalik semua itu timbul pertanyaan, untuk mencapai 30 persen itu kapan? ‘dinegara lain untuk 30 persen itu dicapai butuh masa puluhan tahun, tetapi bagi kami ‘trend’ peningkatan itu merupakan sebuah indicator yang bagus.....*” (Paragraf 6).

Sedangkan pernyataan Oelfah A. Syahrullah “....*sesungguhnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam politik pada dasarnya bukan pada persoalan ketidakadilan. Mungkin saja perempuan belum siap, namun ketidaksiapan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan karena ini baru permulaan. Oleh karenanya, perempuan haruslah diberikan peluang dan kesempatan untuk berkiprah secara luas dalam bidang politik. Adapaun langkah-langkahnya bisa berupa, pertama, diharapkan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada politisi perempuan, sebaliknya politisi perempuan harus memperlihatkan kinerja yang baik.*” (Paragraf 9) “*Kedua, mungkin saja melalui media dapat mengangkat perempuan-perempuan berkualitas dalam publikasinya. Ia juga menyatakan bahwa pada*

kenyataannya perjuangan politik perempuan diusahakan oleh kaum perempuan itu sendiri. 'ini merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan', segera." (Paragraf 10)

Sementara Endang Agustini Syarwan Hamdid mengungkapkan *"....bahwa sesungguhnya perempuan yang berkualitas itu semakin banyak. Hanya saja memang perempuan itu banyak pertimbangan sosialnya, dimana dia masih lebih banyak memikirkan keluarga. Dan perempuan di politik, ia berkeyakinan bahwa perempuan itu menjalankan misi politiknya lebih baik dan jujur, ketimbang laki-laki. 'kita bisa lihat yang ditangkap KPK itu lebih banyak Bapak-bapak dibandingkan Ibu-ibu'. Ujurnya berargumen." (Paragraf 14)*

Sedangkan pada akhir penutup wartawan meyakini dan optimis bahwa perempuan akan memberikan warna pada politik di negeri ini, khususnya keterwakilannya di Parlemen. Paragraf 16 *"Dari hal semua tersebut, rasanya mengenai politisi perempuan ini pada dasarnya telah mengalami kemajuan berarti, walaupun masih belum mencapai target yang diharapkan. Dengan kondisi seperti itu, kembali lagi perempuan tersebut harus memberikan bukti melalui karya nyata dan mampu memberikan dinamisasi di parlemen, bukan hanya sekedar memenuhi quota 30 persen. Disamping itu juga tentunya beri ruang kepada perempuan untuk terus berkiprah dalam menembus dominasi politik laki-laki. Sehingga apa yang kita harapkan untuk memberikan sebuah arti bagi pembangunan Indonesia secara umum."*

3. Semantik

Dalam pembahasan teks Semantik didasarkan pada latar, detail, dan maksud. Semantik (arti) yaitu makna yang ditekankan dalam teks berita.

a. Latar

Dalam latar penulisan Majalah Figur, wartawan mencoba membedah persoalan ini dengan mewawancarai tiga narasumber, hal ini dimaksudkan sebagai bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik. Yang pertama Andi Timo Pangarang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, kedua Oelfah A. Syahrulla Harmanto, anggota DPR RI Komisi VIII, dan yang ketiga adalah Endang Agustini Syarwan Hamid.

Dari ketiga narasumber ini penulis sangat menyayangkan, kenapa wartawan majalah Figur hanya mewawancarai anggota DPR RI saja, kenapa tidak mencoba mewawancarai perempuan parlemen dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), parlemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pengamat feminisme diluar parlemen. Selain itu, wartawan juga tidak memberikan suara laki-laki didalam proses wawancaranya. Jadi ada perimbangan antara suara yang diberikan laki-laki dan perempuan.

b. Detail

Elemen detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Pada paragraf 6 baris ke 4 secara detail Andi Timo Pangarang memberikan penjelasan tentang peningkatan keterwakilan perempuan. *“....bahwa perwakilan perempuan itu mengalami peningkatan dibandingkan periode yang lalu dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi yang bagus, dimana periode 2004-2009 hanya sekitar 11 persen, sedangkan ditahun 2009-2014 sekitar 18 persen.*

Sementara Oelfah D. Harmanto memberikan penjelasan tentang langkah dalam peluang dan kesempatan untuk kiprahnya didunia politik. *Paragraf 9 baris ke 12 “Oleh karenanya, perempuan haruslah diberikan peluang dan kesempatan untuk berkiprah secara luas dalam bidang politik. Adapun langkah-langkahnya berupa, pertama: diharapkan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada politisi perempuan, sebaliknya politisi perempuan pun harus memperhatikan kinerja yang baik. Kedua: mungkin saja melalui media dapat mengangkat perempuan-perempuan berkualitas dalam publikasinya.”*

Lain halnya yang dikatakan Endang Agustini Syarwan Hamid, dia melihat perempuan mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan laki-laki. *Paragraf 15 baris ke 5 “naluri perempuan itu lebih ke rasa saying ketimbang memikirkan yang jelek-jelek. Disitulah rasa keadilan dan rasa persamaan tumbuh sembur sebagai bagian dari persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki.*

c. Maksud

Elemen maksud hampir sama dengan detail, tujuannya hampir sama. Menguntungkan ungkapan yang disampaikan komunikator. Dari isi artikel yang disampaikan, ketiga narasumber mencoba memberikan pemaparan bahwa perempuan lebih baik dari pada laki-laki didalam hal menjalankan misi politiknya lebih baik dan jujur. Terlebih peningkatan suara perempuan merupakan cermin ketidak percayaan pemilih terhadap keterwakilan laki-laki di politik. Sehingga masyarakat pelan-pelan mulai memberikan kepercayaan kepada politik perempuan. Memang, walaupun begitu

perempuan mempunyai keterbatasan didalam pertimbangan sosial, dimana perempuan masih lebih banyak memikirkan keluarga.

4. Sintaksis

Pada pembedahan teks berikutnya, sintaksis dibagi menjadi tiga: koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Sintaksis melihat pada bagaimana kalimat (bentuk kalimat, susunan) yang dipilih.

a. Koherensi

Koherensi adalah pertalian atau jalinan anatar kata, atau kalaimat dalam teks. Unsur pertautan kata dalam artikel Majalah Figur, wartawan mencoba menyusun persoalan dari pernyataan narasumber satu ke narasumber yang lain. Hal ini terlihat pada pertalian pernyataan Andi Timo Pangerang paragraf 8 yang disambung paragraf 9 oleh Oelfah A. Syahrullah. Lalu paragraf yang saling melangkapi antara paragraf 12, 13, dan 14.

“Banyak perempuan yang gampang karena tidak memiliki uang untuk terjun ke dunia politik. Mereka sadar secara politik, bahwa mereka berbeda dengan laki-laki seperti mereka yang melahirkan dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pola pikir itu sudah terjadi dan menjadi kenyataan sekarang ini. Oleh karenanya kita sejuat tenaga untuk merubah cara pandang seperti itu, dengan memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan agar jangan berkecil hati. ‘ini sebuah kenyataan, sekarnag kita tidak usah takut dalam perubahan ini’ terangnya”. (Paragraf 8)

“.....sesungguhnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam politik pada dasarnya bukan pada persoalan ketidakadilan. Mungkin saja perempuan belum siap,

namun ketidaksiapan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan karena ini baru permulaan. Oleh karenanya, perempuan haruslah diberikan peluang dan kesempatan untuk berkiprah secara luas dalam bidang politik. Adapaun langkah-langkahnya bisa berupa, pertama, diharapkan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada politisi perempuan, sebaliknya politisi perempuan harus memperlihatkan kinerja yang baik.” (Paragraf 9)

“Bicara mengenai kualitas perempuan yang banyak dikatakan kalangan masih belum memenuhi kualifikasi tersebut, Oelfah berpandangan bahwa hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Ia mengatakan bahwa pada saat rapat kerja menjadi ukuran kualitasnya. Banyak anggota perempuan yang memberi masukan dan pertanyaan yang cerdas. Lebih terlihat lagi, ketika diberi tanggungjawab politisi perempuan di parlemen tidak kalah kualitasnya dengan laki-laki. ‘sebenarnya, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sejauhmana hasil kerja kaum perempuan di parlemen’, tambahnya” (Paragraf 12)

“....., bahwa memang pada dasarnya bukan hanya perempuan saja, laki-laki pun masih belum memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Jika dilihat dari masa kerja anggota Dewan 2009-2014, itu baru memasuki masa sidang ke dua atau baru bekerja kurang lebih 4 bulan efektif didalam gedung parlemen dan diluar itu adalah masa reses. ‘rasanya terlalu dini kita untuk menilai kualitas perempuan itu, dengan masa kerja 4 bulan efektif’, jelasnya” (Paragraf 13)

“....bahwa sesungguhnya perempuan yang berkualitas itu semakin banyak. Hanya saja memang perempuan itu banyak pertimbangan sosialnya, dimana dia masih lebih

banyak memikirkan keluarga. Dan perempuan di politik, ia berkeyakinan bahwa perempuan itu menjalankan misi politiknya lebih baik dan jujur, ketimbang laki-laki. 'kita bisa lihat yang ditangkap KPK itu lebih banyak Bapak-bapak dibandingkan Ibu-ibu'. Ujurnya berargumen." (Paragraf 14)

b. Bentuk Kalimat

Dalam bentuk kalimat dijelaskan bahwa kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataan, sedangkan dalam kalimat pasif seorang menjadi objek dari pernyataan. Pernyataan Andi Timo Pangerang, paragraf 8 *"Banyak perempuan yang gampang karena tidak memiliki uang untuk terjun ke dunia politik. Mereka sadar secara politik, bahwa mereka berbeda dengan laki-laki seperti mereka yang melahirkan dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya....."*. Pernyataan Oelfah A. Syahrullah Harmanto, paragraf 9 *"....sesungguhnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam politik pada dasarnya bukan pada persoalan ketidakadilan. Mungkin saja perempuan belum siap, namun ketidaksiapan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan karena ini baru permulaan. Oleh karenanya, perempuan haruslah diberikan peluang dan kesempatan untuk berkiprah secara luas dalam bidang politik.*

Pernyataan Endang Agustini Syarwan Hamid, paragraf 14 *"....bahwa sesungguhnya perempuan yang berkualitas itu semakin banyak. Hanya saja memang perempuan itu banyak pertimbangan sosialnya, dimana dia masih lebih banyak memikirkan keluarga. Dan perempuan di politik, ia berkeyakinan bahwa perempuan itu menjalankan misi politiknya lebih baik dan jujur, ketimbang laki-laki. 'kita bisa lihat yang ditangkap KPK itu lebih banyak Bapak-bapak dibandingkan Ibu-ibu'*

Dalam hal ini unsur narasumber dijadikan sebagai subjek pernyataan sedangkan ‘perempuan’ dan ‘laki-laki’ dijadikan kalimat pasif karena menjadi objek pernyataan.

c. Kata Ganti

Dalam kata ganti Majalah Figur mencoba mengganti kata perempuan dengan kata “mereka”, selain itu kata “kita” digunakan untuk menggambarkan ungkapan kata dari narasumber. Hal ini terlihat pada paragraf 7 baris 3 “.... Mereka sadar secara politik, bahwa mereka berbeda dengan laki-laki seperti mereka yang melahirkan dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. Pola pikir itu sudah terjadi dan menjadi kenyataan sekarang ini. Oleh karenanya kita sekuat tenaga untuk merubah cara pandang seperti itu, dengan memberikan pemahaman kepada teman-teman perempuan agar jangan berkecil hati. Ini sebuah kenyataan, sekarang kita tidak usah takut dalam perubahan ini.

Dari pemaparan kata diatas, bergantinya penggunaan kata perempuan menjadi kata mereka. Merupakan cermin tidak kekonsistenan wartawan untuk stabil menggunakan kata perempuan dalam bahasa teks yang digunakan. Selain itu penggunaan kata kita, digunakan narasumber sebagai bentuk perjuangan mewakili perjuangan gerakan perempuan berpolitik di parlemen. Tetapi kata kita disini telah mewakili keseluruhan anggota parlemen perempuan dan laki-laki, sedangkan tidak semua anggota laki-laki juga mendukung gerakan ini. Karena adanya kepentingan politik di dalam perolehan suara laki-laki dan perempuan.

5. Stilistik

Stilistik merupakan bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.

a. Leksikon

Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata sebagai kemungkinan kata yang tersedia. Paragraf 1 baris ke 1 kata ‘terpasung’ Kata terpasung disini diibaratkan sebuah ???/. *“Setelah sekian lama hak berpolitik ‘terpasung’, seakan ini kaum perempuan sudah bisa bernafas lega. Di era reformasi, pemerintah bersama DPR telah melakukan reformasi di bidang politik terkait dengan kebebasan berpolitik warga negara, termasuk kaum perempuan”.*

Paragraf 4 baris ke 6 kata ‘mendobrak’ memberi pengertian sebuah perlawanan perempuan didalam memperjuangkan ???/ *“Hal ini sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi kaum perempuan. Dimana perempuan ditantang untuk mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis....”*

6. Retoris

Retoris merupakan bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.

a. Grafis

Grafis merupakan elemen bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seorang yang dapat diamati dari teks. Dibalik wawancara yang ditulis wartawan terhadap narasumber tidak semuanya wartawan menuliskan hal-hal yang positif, didalam tulisan masih ada suara pesimis dari kaum perempuan itu sendiri akan kuota 30 persen yang diberikan. Paragraf 6 baris ke 10 ada ungkapan *“namun dibalik semua pertanyaan, untuk mencapai 30 persen itu dicapai*

butuh masa puluhan tahun, tetapi bagi kami trend peningkatan itu merupakan sebuah indicator yang bagus”.

Paragraf 9 baris ke 3 *“sesungguhnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam politik pada dasarnya bukan pada persoalan ketidakadilan. Mungkin saja perempuan belum siap, namun ketidaksiapan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan karena ini baru permulaan.* Baris ke 13 *“diharapkan kebijakan dari pimpinan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada politisi perempuan, sebaiknya politisi perempuan pun harus memperhatikan kinerja yang baik.*

Paragraf 10 baris ke 4 *“....bahwa pada kenyatannya perjuangan politik perempuan diusahakan oleh kaum perempuan itu sendiri. Ini merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan.* Paragraf 14 baris ke 4 *“hanya saja memang perempuan itu banyak pertimbangan sosialnya, dimana dia masih lebih banyak memikirkan keluarga.* Paragraf 16 baris ke 5 *“dengan kondisi seperti itu, kembali lagi perempuan tersebut harus memberikan bukti melalui karya nyata dan mampu memberikan dinamisasi di parlemen, bukan hanya sekedar memenuhi kuota 30 persen”.*

b. Metafora

Metafora suatu wacana seseorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan. Ungkapan yang digunakan oleh wartawan Majalah Figur dalam paragraf 1 baris ke 1 *“setelah sekian lama hak berpolitik terpasung, sekarang ini kaum perempuan sudah bisa bernafas lega. Di era reformasi, pemerintah bersama DPR telah melakukan ferormasi di bidang politik terkait dengan kebebasan berpolitik warga negara, termasuk kaum perempuan”.* Kata “terpasung” seolah

wartawan memberikan kiasan tentang sesuatu yang sulit bergerak karena terikat rantai. Jadi wartawan mencoba menggambarkan situasi “terpasung” sebagai kiasan gerakan perempuan berpolitik yang masih terganjal oleh aturan yang ada.

Judul : Sadari Dan Pahami Kesetaraan Jender Mulai Dari
Sekarang

Media : Majalah Figur

Edisi/Bulan/Tahun : XLVIII/April/2010
Halaman : 29
Narasumber : Abdul Kadir Karding (Ketua Komisi VII DPR RI)

1. Tematik

Dalam tulisan ini justru arahan datang dari wartawan yang mewawancarai narasumber, wartawan terlihat mengarahkan pertanyaan yang sifatnya umum mengenai masalah Gender melalui paparan yang disampaikan. Maka dari hasil wawancara tersebut muncul mengenai persoalan gender yang berada di legislatif, lembaga eksekutif maupun politik di luar pemerintah.

2. Skematik

Pada awal penulisan wartawan mencoba menggambarkan persoalan mengenai masih ada diskriminasi politik gender di lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun diluar pemerintahan. Dijelaskan pada paragraf 1 *“aspirasi kaum perempuan bisa dibawa melalui politik, syaratnya adalah, harus ada pemahaman yang sama di kalangan praktisi politik baik yang duduk di luar pemerintahan, tentang kesetaraan gender, sehingga tidak ada lagi politik diskriminasi. Paragraf 3 baris ke 5 “...jumlah anggota DPR RI dan DPD RI dari kalangan perempuan yang semakin banyak tentunya juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan publik, memahami tugas dan fungsi utamanya sebagai pembuat regulasi dalam bentuk perundang-undangan atau kebijakan public lainnya apakah diskriminatif atau tidak terhadap kaum perempuan”.*

Pada pertengahan wawancara wartawan mencoba mengarahkan wawancara pada solusi dan hambatan terhadap politik perempuan. Paragraf 8 berbicara solusi *“cara mewujudkan politik yang pro terhadap kaum perempuan harus dilakukan melalui dua cara, yang pertama adalah membuat system politik yang demokratis baik dalam konteks partai politik, sehingga peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal partai politik tidak diskriminatif. Dari situ kaum perempuan bisa masuk dalam kancah politik tanpa adanya hambatan dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan setiap partai politik.”* Lanjut paragraf 9 *“Yang kedua adalah menciptakan budaya politik mulai dari keluarga, lingkungan maupun masyarakat yang terbuka dan non diskriminatif....”*

Paragraf 11 bicara tentang hambatan yang dihadapi, *“tantangan dan hambatan adalah kultur masyarakat kita masih banyak yang diskriminatif terhadap peran politik kaum perempuan, misalnya jarang kaum perempuan yang mau terlibat aktif dalam kegiatan politik, kepengurusan partai politik dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki, demikian juga jabatan-jabatan public seperti kepala desa/lurah, perangkat desa, bupati, gubernur, menteri maupun jabatan publik lainnya masih didominasi kaum laki-laki. Hal mendasar ini yang perlu dipahami oleh laki-laki dan perempuan. Agar laki-laki memberi ruang dan perempuan berani untuk tampil”*.

3. Semantik

Dalam pembahasan teks Semantik didasarkan pada latar, detail, dan maksud. Semantik (arti) yaitu makna yang ditekankan dalam teks berita.

a. Latar

Dalam sisi latar, wartawan tidak banyak mengeluarkan ide untuk melakukan sebuah gagasan ide tulisan. Disini wartawan hanya menulis apa yang mereka peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Jadi semua ide tulisan ini *full* cerita narasumber mengenai permasalahan politik perempuan mengenai gender. Wartawan hanya membuat pertanyaan dan dijawab oleh narasumber. Kelamahan dari penulisan teks ini, wartawan seolah memberi ruang bebas kepada narasumber untuk bercerita.

b. Detail

Dari paragraf 1 sampai 13, terlihat secara detail narasumber menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya melalui tulisan ini. Karena berbeda dengan tulisan sebelumnya, wartawan mencoba mengembangkan ide, lalu diperkuat oleh kutipan narasumber. Tetapi tidak untuk tulisan kali ini, narasumber seolah menyampaikan gagasan kepada publik melalui Majalah Figur tanpa ada campur tangan ide penulisan wartawan itu sendiri.

c. Maksud

Didalam penulisan maksud, hal yang banyak ditonjolkan adalah kata ‘saya’, seharusnya sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI. Abdul Kadir Karding menggunakan pola kita atau kami sebagai bentuk perwakilan aspirasi Komisi VIII. Hal ini terdapat pada paragraf 3, 7, 9, 10, 12, dan 14. Dari kata ‘saya’ yang paling “narsis” adalah paragraf 12 *“Ada beberapa hal yang telah dan akan selalu saya lakukan untuk mewujudkan membuat keputusan-keputusan politik yang tidak diskriminatif. Contohnya, dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) ketika saya masih menjabat sebagai Pimpinan DPRD*

Provinsi Jawa Tengah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan gender mainstreaming, tidak boleh ada peraturan diskriminatif.”

4. Sintaksis

Pada pembedahan teks berikutnya, sintaksis dibagi menjadi tiga: koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Sintaksis melihat pada bagaimana kalimat (bentuk kalimat, susunan) yang dipilih.

a. Koherensi

Dalam koherensi ada sebuah pertalian kata pada pertanyaan *“Bagaimana anda melihat keterwakilan perempuan di Parlemen dapat membenahi kesejahteraan Perempuan?”* pada pertanyaan ini ada pertalian antara paragraf 3,4,5,6, dan 7. *“Saya rasa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan tidak cukup jika hanya mengandalkan dari segi jumlah saja. Jumlah anggota DPR RI dan DPD RI dari kalangan mereka juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan public, memahami tugas dan fungsi utamanya sebagai pembuat regulasi dalam bentuk undang-undang atau kebijakan public lainnya apakah diskriminatif atau tidak terhadap kaum perempuan.”* (paragraf 3)

“Dan yang lebih penting lagi adalah mereka harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan komitmen dan pembelaannya terhadap nasib kaum perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Intinya berikanlah investasi pendidikan kepada Perempuan agar wawasannya dalam mengelola tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.” (paragraf 4). *“Peningkatan jumlah keterwakilan*

kaum perempuan hanya merupakan entry point saja untuk membawa kesejahteraan bagi kaum perempuan. Jangan sampai perempuan itu ketika sudah masuk ke Parlemen, justru tidak tahu apa yang harus di perbuat. Padahal yang ditunggu oleh kaum perempuan yang lain adalah sentuhan-sentuhan perempuan politisi, bagaimana mereka bisa berbuat dan 'mewarnai' system politik kita kearah yang lebih baik bagi perempuan.” (paragraf 5)

“Dan sebenarnya anggota parlemen dari kaum laki-laki pun sebenarnya tidak ada niat untuk mendiskriminasikan kaum perempuan, bahkan banyak juga anggota parlemen dari kaum laki-laki yang menyuarakan aspirasi kaum perempuan.” (paragraf 6)

“Sehingga menurut pandangan saya upaya mensejahterakan kaum perempuan merupakan tanggungjawab bersama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, pemerintah maupun kalangan swasta, organisasi politik maupun ormas. Semua harus ikut bertanggungjawab, tidak bisa tidak.” (paragraf 7)

Dan pada pertanyaan *“Apa strategi yang anda tawarkan agar system politik ini juga pro dengan perempuan?”*. Ada pertalian kata antara paragraf 7,8, dan 9. *“cara mewujudkan politik yang pro terhadap kaum perempuan harus dilakukan melalui dua cara, yang pertama adalah membuat system politik yang demokratis baik dalam konteks kenegaraan maupun dalam konteks partai politik, sehingga peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal partai politik tidak diskriminatif. Dari situ kaum perempuan bisa masuk dalam kancah politik tanpa adanya hambatan dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan setiap partai politik.” (paragraf 8)*

“Yang kedua adalah menciptakan budaya politik mulai dari keluarga, lingkungan maupun masyarakat yang terbuka dan non diskriminatif. Jadi dalam pandangan saya

ranah sistem dan kultur harus berjalan bersama-sama karena sistem akan berpengaruh terhadap praktik sosial (kultur) yang berkembang di masyarakat dan sebaliknya kultur yang berkembang di masyarakat juga akan berpengaruh terhadap pembentukan sistem. Hal ini yang dalam teori social dinamakan dualitas. (paragraf 9) “Karena bagi saya, politik yang pro kepentingan kaum perempuan adalah politik yang menjadikan perempuan sebagai subyek atau actor politik bukan hanya sekedar menjadi obyek politik, politik yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak kaum perempuan. Peran perempuan sangat besar pengaruhnya dalam hal apapun, jadi posisi yang strategis itu akan memiliki multiplier effect yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.” (paragraf 10).

Selain itu pada pertanyaan “Apa contoh konkret politik yang pro terhadap Perempuan?” paragraf 12 ke 13 “ada beberapa hal yang telah dan akan selalu saya lakukan untuk mewujudkan membuat keputusan-keputusan politik yang tidak diskriminatif. Contohnya, dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) ketika saya masih menjabat sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan gender mainstreaming, tidak boleh ada peraturan diskriminatif. (Paragraf 12), “Dalam konteks partai politik saya selalu menekankan agar kepengurusan PKB disusun dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara laki-laki dan perempuan, demikian pula agar program kerjanya tidak boleh mendiskriminasikan kaum perempuan. (paragraf 13)

b. Bentuk Kalimat

Dalam rubrik wawancara, kalimat aktif dilontarkan narasumber melalui bentuk kata ‘saya’. Paragraf ke 3 baris 1 *“Saya rasa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan tidak cukup jika hanya mengandalkan dari segi jumlah saja.....”*. Paragraf 7 baris 1 *“Sehingga menurut pandangan saya upaya mensejahterakan kaum perempuan merupakan tanggungjawab bersama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, pemerintah maupun kalangan swasta, organisasi politik maupun ormas. Semua harus ikut bertanggungjawab, tidak bisa tidak.”*. Paragraf 10 baris ke 1 *“Karena bagi saya, politik yang pro kepentingan kaum perempuan adalah politik yang menjadikan perempuan sebagai subyek atau actor politik bukan hanya sekedar menjadi obyek politik, politik yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak kaum perempuan. Peran perempuan sangat besar pengaruhnya dalam hal apapun, jadi posisi yang strategis itu akan memiliki multiplier effect yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.”*

Paragraf 12 baris ke 2 dan 7 *“Ada beberapa hal yang telah dan akan selalu saya lakukan untuk mewujudkan membuat keputusan-keputusan politik yang tidak diskriminatif. Contohnya, dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) ketika saya masih menjabat sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan gender mainstreaming, tidak boleh ada peraturan diskriminatif.”* Paragraf 13 baris ke 1 *“Dalam konteks partai politik saya selalu menekankan agar kepengurusan PKB disusun dengan mempertimbangkan proporsionalitas antara laki-laki dan perempuan, demikian pula agar program kerjanya tidak boleh mendiskriminasikan kaum perempuan.”*

Paragraf 14 baris 4 *“Saya rasa prospeknya ke depan semakin baik meskipun tantangannya juga semakin kompleks, karena semakin banyak kalangan yang menyuarakan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Masyarakat juga semakin modern dan demokratis. Sementara itu iktan-ikatan primordial yang mendiskreditkan kaum perempuan baik pada ranah agama maupun kultural juga sudah semakin memudar. Saatnya sekarang kesadaran dan pemahaman tentang kesetaraan jender dilaksanakan dalam wujud konkret, bersama membangun bangsa dan negara.*

c. Kata Ganti

Kata ‘mereka’ menggantikan kata perempuan di parlemen, paragraph 4 baris 1 *“Dan yang lebih penting lagi adalah mereka harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan komitmen dan pembelaannya terhadap nasib kaum perempuan dalam setiap pengembalian kebijakan. Intinya berikanlah investasi pendidikan kepada Perempuan agarawasannya dalam mengelola tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.”*

Kata saya menggantikan penggunaan kata nama Abdul Kadir Karding. Paragraf 3 baris 1 *“Saya rasa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum perempuan tidaklah cukup jika hanya mengandalkan dari segi jumlah saja.....”*. Paragraf 7 baris ke 1 *“Sehingga menurut pandangan saya upaya mensejahterakan kaum perempuan merupakan tanggungjawab bersama antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, pemerintah maupun kalangan swasta, organisasi politik maupun orams. Semua harus ikut bertanggungjawab, tidak bisa tidak”*.

Paragraf 9 baris ke 5 “Yang kedua adalah menciptakan budaya politik mulai dari keluarga, lingkungan maupun masyarakat yang terbuka dan non diskriminatif.....”.

Paragraf 10 baris ke 1 “karena bagi saya, politik yang pro kepentingan kaum perempuan sebagai subyek menjadikan perempuan sebagai subyek atau aktor politik bukan hanya sekedar menjadi obyek politik, politik yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak kaum perempuan....”. paragraf 12 baris ke 2 dan 7 “Ada beberapa hal yang telah dan akan selalu saya lakukan untuk mewujudkan politik yang pro perempuan yaitu dengan membuat keputusan-keputusan politik yang diskriminatif. Contohnya, dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) ketika saya masih menjabat sebagai Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan gender mainstreaming, tidak boleh ada peraturan yang diskriminatif”. Paagraf 14 baris ke 1 “Saya rasa prospek ke depan semakin baik meskipun tantangannya juga semakin kompleks, karena semakin banyak kalangan yang menyuarakan dan memperjuangkan kesetaraan gender.....”.

5. Stalistik

Stilistik merupakan bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.

a. Leksikon

Dalam pemilihan kata wartawan mencoba menggunakan kata ‘regulasi’ sebagai kata aturan. Paragraf 3 baris ke 11, “.....Jumlah anggota DPR RI dan DPD RI dari kalangannya juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan publik, memahami tugas dan fungsi utamanya sebagai

pembuat regulasi dalam bentuk perundang-undangan atau kebijakan public lainnya apakah diskriminatif atau tidak terhadap kaum perempuan”. Paragraf 6 baris ke 4 kata mendiskriminasikan “Dan sebenarnya anggota parlemen dari kaum laki-laki pun sebenarnya tidak ada niatan untuk mendiskriminasikan kaum perempuan, bahkan banyak juga anggota parlemen dari kaum laki-laki yang menyuarakan aspirasi kaum perempuan”.

Paragraf 10 kata subyek dan obyek *“karena bagi saya, politik yang pro kepentingan kaum perempuan sebagai subyek menjadikan perempuan sebagai subyek atau aktor politik bukan hanya sekedar menjadi obyek politik, politik yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak kaum perempuan.....”.*

6. Retoris

Retoris merupakan bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.

a. Grafis

Didalam penulisan grafis, Pada paragraf 1 baris ke 1 ada maksud tertentu memaparkan idenya dengan mencetak tebal tulisan *lead* dan menuliskan tiga kata berhuruf besar semua. *“ASPIRASI KAUM PEREMPUAN bisa dibawa melalui politik, syaratnya adalah, harus ada pemahaman yang sama di kalangan praktisi politik baik yang duduk di lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun para aktifis politik di luar pemerintah, tentang kesetaraan gender, sehingga tidak ada lagi politik diskriminasi.”* Selain itu penulisan nama H. Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si (ketua Komisi VII DPR RI dan

Ketua DPP PKB) pada paragraf 2 baris ke 6 dicetak tebal guna menarik perhatian pembaca dan mengenali sosok narasumber.

Selain itu pada paragraf 4 baris ke 11 pada kata “.....*bagaimana mereka bisa berbuat dan ‘mewarnai’ sistem politik kita kearah yang lebih baik bagi perempuan*”. Disini ada tanda kutipan pada kata “mewarnai” yang memberikan arti bahwa narasumber mencoba menggambarkan bagaimana hadirnya suara perempuan di parlemen akan memberikan suara-suara yang berbeda dari biasanya.

b. Metafora

Kata yang tepat didalam untkapan narasumber dalam teks ini terdapat pada paragraf 10. “*Karena bagi saya, politik yang pro kepentingan kaum perempuan adalah politik yang menjadikan perempuan sebagai subyek atau actor politik bukan hanya sekedar menjadi obyek politik, politik yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan kaum perempuan dan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak kaum perempuan. Peran perempuan sangat besar pengaruhnya dalam hal apapun, jadi posisi yang strategis itu akan memiliki multiplier effect yang positif bagi kehidupan berbangsa dan berneegara.*”

Judul : Nyaris Tak Terdengar

Media : Majalah Femina

Edisi/Bulan/Tahun : ??/April/2010

Halaman : 38 – 41

Narasumber : Ani Soetjipto (Pengajar FISIP Universitas Indonesia)

Eva Kusuma Sundari (Anggota Komisi XI F-PDI Perjuangan)

1. Tematik

Dalam tulisan yang dibuat oleh wartawan majalah Femina disini terlihat, nada optimis dari wartawan akan perjuangan perempuan di parlemen. Terlebih di dalam ungkapan tanya yang ditulis pada paragraf 2 *“Bagaimana dengan Indonesia? Meski masih ada yang percaya mitos –bahwa politik adalah urusan pria—wanita mulai eksis di dunia politik, yang kata sebagian orang bisa sangat kejam ini. Pemilu 2004 yang memilih langsung DPR, bisa dijadikan contoh. Wanita yang lolos ke Senayan naik menjadi 18% dari periode sebelumnya (2004-2009) yang sebesar 11,8%. Apakah kenaikan jumlah ini sudah ada efeknya bagi kehidupan kita?”*.

2. Skematik

Pada awal paragraf wartawan mencoba menggambarkan latar persoalan sejarah perjuangan munculnya awal mula wanita diberi kebebasan berpolitik. Hingga masuk ke persoalan kuota 30 persen yang terjadi di dalam pemilihan politik di Indonesia. Paragraf 1 *“Jangan remehkan kekuatan seorang wanita. Kalimat ini hanya satu dari sekian banyak pesan penuh makna peningkatan wanita aktivis asal Kanada, Nellie McClung (1873-1951). Nellie menorehkan sejarah tatkala ia berhasil membuka kesempatan wanita negerinya untuk memilih dalam pemilu”*.

Lalu cerita tentang sekailah tentang perjuangan kuota 30 persen, Paragraf 3 *“Kuota 30 persen yang disulkan para wanita aktivis memang telah digugurkan Mahkamah Konstitusi dan digantikan dengan sistem pemilihan langsung (pemilihan menyontren langsung caleg pilihannya). Namun, system yang awalnya diprediksi bakal ‘jeruk makan jeruk’, alias bersaing tidak sehat antar calang dalam internal partai maupun antarpartai,*

ternyata menjadi ‘berkah’ tersendiri bagi kaum hawa. Apalagi kalau bukan kenaikan presentase jumlah wanita di DPR”.

Pada tengah tulisan, wartawan mencoba memperkuat tulisan dengan pernyataan dari narasumber. Paragraf 6 dan 8, *“Eva Kusuma Sundari, mengatakan, sebelum menjalankan tiga fungsi utama tadi, anggota dewan harus sungguh-sungguh menyadari dulu siapa yang mereka wakili. ‘misalnya’, masih banyak anggota dewan yang belum firm. Mereka belum yakin masyarakat mana yang ingin mereka representasikan. Seseorang ahli anggaran sekalipun bisa tak ada gunanya duduk di DPR, bila ia tidak tahu siapa yang dibela,” kata Eva, satu dari sedikit wanita politikus yang menuai apresiasi publik. (Paragraf 6)*

“Ani Soetjipto, memahami keseriusan ini. ‘saya melihat, sebabnya antara lain karena 90% anggota DPR sekarang adalah wajah baru, belum memiliki rekam jejak sebagai tokoh politik formal’. Ungkapnya. Wajah-wajah baru ini –baik wanita maupun pria—ada yang dating dari kalangan selebritis, dinasti politik yang sudah eksis, dan pengusaha. ‘yang benar-benar dari kader partai hanya hanya sebagian kecil, ‘papar ani. Karenanya, mereka tidak mudah beradaptasi. ‘Kalau diseriusi, pekerjaan sebagai anggota DPR itu jauh dari mudah,’ tambahnya

Pada akhir-akhir kalimat wartawan mencoba memberi semangat kepada politikus wanita untuk berani melawan semua tantangan yang ada, hal ini terlihat dari judul kecil *“Berani Melawan Mitos”*

3. Semantik

Dalam pembahasan teks Semantik didasarkan pada latar, detail, dan maksud. Semantik (arti) yaitu makna yang ditekankan dalam teks berita

a. Latar

Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Maka dalam latar penulisan, wartawan mencoba mengarahkan persoalan ini kepada dua narasumber yaitu Ani Soetjipto, pengajar FISIP Universitas Indonesia dan Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi XI Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu pada awal paragraf wartawan mencoba mengangkat tokoh Nellie McClung (1873-1951) seorang aktivis asal Kanada

b. Detail

Elamen detail yang sangat ditonjolkan pada narasumber adalah paragraf 13 ungkapan Eva *“Agar tidak menjadi sekedar hiasan, menurut eva, legislator harus punya kemampuan bicara. ‘Wakil rakyat yang tidak bisa bicara, keberadaannya tidak member efek,; katanya. Tapi, bukan pula berarti tong kosong nyaring bunyinya. ‘Mengisi kepala dengan pengetahuan dan mendalami persoalan di lapangan sangat diperlukan, sebelum bicara di forum maupun di media massa’. Katanya. Untuk keperluan ini, Eva rutin turun kepada konstituen (masyarakat pemilih)-nya dan berdiskusi dengan LSM. ‘Dari salah satu diskusi seperti itulah, saya baru mengerti, kekerasan domestic ternyata bisa juga terjadi di masa pacaran, bukan hanya terjadi dalam perkawinan,’ katanya.”*

Paragraf 20 ungkapan Ani, *“Ani menyadari, keberadaan wanita di DPR tak tergantikan, meski seandainya makin banyak pria yang berperspektif gender.’ Tak semua masalah bisa selesai dengan baik, sebagus apa pun perspektif gender yang dimiliki pria. Ada 3 kebijakan public yang hanya bisa sempurna bila melibatkan perspektif dan peran*

wanita di dalamnya,' katanya. Pertama, kebijakan public dengan wanita sebagai sebjek, misal kesehatan reproduksi, kebijakan yang mengatur tubuh wanita dan seksualitas wanita, seperti keluarga berencana dan pornografi. Paragraf 21 "Kedua, kebijakan yang mengatur relasi antara pria dan wanita. Misalnya, UU Perkawinan, kawin siri, dan pornografi. Paragraf 22 "Ketiga, kebijakan yang netral-gender, tapi high-politics. Seperti politik luar negeri, keamanan, perdagangan internasional, dan makro ekonomi.

c. Maksud

Dalam tulisan ini banyak hal-hal komentar yang menguntungkan narasumber dimasukkan kedalam tulisan ini. Paragraf 13 baris ke 10 "*Agar tidak menjadi sekedar hiasan, menurut eva, legislator harus punya kemampuan bicara. 'Wakil rakyat yang tidak bisa bicara, keberadaannya tidak member efek,; katanya. Tapi, bukan pula berarti tong kosong nyaring bunyinya. 'Mengisi kepala dengan pengetahuan dan mendalami persoalan di lapangan sangat diperlukan, sebelum bicara di forum maupun di media massa'. Katanya. Untuk keperluan ini, Eva rutin turun kepada konstituen (masyarakat pemilih)-nya dan berdiskusi dengan LSM. 'Dari salah satu diskusi seperti itulah, saya baru mengerti, kekerasan domestic ternyata bisa juga terjadi di masa pacdaran, bukan hanya terjadi dalam perkawinan,' katanya.*"

Paragraf 15 baris ke 7. "*Politikus pria bole saja fasih bicara soal HAM, tetapi pada praktiknya, mereka sering lupa kesetaraan. Budaya kita sangat patriarkat,' kata Eva. Tak jarang, ketika ia menyuarakan hak wanita, Eva menerima komentar bernada seksis. Kolega pria satu fraksinya pernah berkata, 'ah, pusing aku ngadepin Eva. Nyinyir banget.*" Paragraf 17 baris ke 3 dan 8 "*Agar eksis dilingkungan pria, menurut Eva,*

wanita politikus harus berani melawan mitos. Misalnya, mitos bahwa wanita harus selalu bersikap lemah lembut, dan mitos bahwa wanita yang menanyakan haknya berarti bawel atau kelewat ambisius. ‘begitu saya tahu hendak disingkirkan, saya melawan. Misalnya, ketika saya sebagai ketua tidak diundang rapat, maka saya tak segan menegur kolega,’ ceritanya. Eva bertekad akan terus mengganggu wanita sebagai warga kelas dua.

Paragraf 18 baris ke 3 “Untuk melawan kebiasaan yang telanjur mengakar, seorang harus lebih keras menunjukkan kemampuan diri. Eva, misalnya, berinisiatif menuliskan laporan Pansus Century ketika tak ada satu pun koleganya yang tergerak. ‘Walaupun, itu berarti saya begadang seminggu. Positifnya, berat badan saya turun tanpa diet,’ katanya, tertawa.”

Sintaksis

Sintaksis dibagi menjadi tiga: koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Sintaksis melihat pada bagaimana kalimat (bentuk kalimat, susunan) yang dipilih.

a. Koherensi

Dalam jalinan pertalian kata, ada penguatan kata didalam pernyataan narasumber. Paragraf 8 ke 9, paragraf 10 ke 11, paragraf 12 ke 13, paragraf 19 ke 20, dan paragraf 22 baris 1 ke 4. “Karena kelemahan itu pula, wanita legislator pun belum tentu menyuarkan isu-siu wanita. Jujur saja, banyak wanita di DPR, yang sosoknya saja wanita, tetapi pemikirannya malah patriarkit, ‘ujurnya.” (Paragraf 8) “Ani Soetjipto, memahami keseriusan ini. ‘saya melihat, sebabnya antara lain karena 90% anggota DPR sekarang adalah wajah baru, belum memiliki rekam jejak sebagai tokoh politik formal’.

Ungkapnya. Wajah-wajahbaru ini –baik wanita maupun pria—ada yang dating dari kalangan selebritis, dinasti politik yang sudah eksis, dan pengusaha. ‘yang benar-benar dari kader partai hanya hanya sebagian kecil, ‘papar ani. Karenanya, mereka tidak mudah beradaptasi. ‘Kalau diseriusi, pekerjaan sebagai anggota DPR itu jauh dari mudah,’ tambahnya” (Paragraf 9).

“Dengan jujur, Eva, mantan dosen yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat, mengatakan, tidak ada seorang pun yang siap menjadi anggota DPR, sekalipun ia berpendidikan amat tinggi. “Awalnya, saya juga tidak siap. Tapi, ini adalah proses belajar yang tak henti-henti. Pembinaan kader dari partai, sifatnya umum. Untuk memahami sampai mendetail, kita harus belajar sendiri,’ katanya.” (Paragraf 11). “Ani menyoroti lemahnya mekanisme internal dari partai politik dalam menjaring kader wanita. ‘Mereka mau gampang saja, memilih siapa saja, yang penting lolos verifikasi KPU dan bisa ikut pemilu. Jarang ada pertimbangan, si calon ini merepresentasikan siapa? Akan member manfaat apa kepada partai dan konstituen, bila dia terpilih?’ papar Ani”(Paragraf 12).

“Ringkasanya, kata Ani, partai tidak mau repot. Lebih mudah buat mereka untuk mencalonkan anak, istri, keponakan, teman-teman, atau figur terkenal atau figur yang berkantong tebal, ketimbang sibuk menjaring calon yang kredibel. ‘Padahal, calon yang mereka usung itu justru belum tahu persoalannya riil masyarakt. Mereka juga tak punya dukungan yang mengakar. Berpolitik cara instan ini membuat banyak dari mereka sekedar menjadi hiasan di parlemen.” (Paragraf 13). “Agar tidak menjadi sekedar hiasan, menurut eva, legislator harus punya kemampuan bicara. ‘Wakil rakyat yang tidak bisa bicara, keberadaannya tidak member efek,; katanya. Tapi, bukan pula berarti tong

kosong nyaring bunyinya. 'Mengisi kepala dengan pengetahuan dan mendalami persoalan di lapangan sangat diperlukan, sebelum bicara di forum maupun di media massa'. Katanya. Untuk keperluan ini, Eva rutin turun kepada konstituen (masyarakat pemilih)-nya dan berdiskusi dengan LSM. 'Dari salah satu diskusi seperti itulah, saya baru mengerti, kekerasan domestic ternyata bisa juga terjadi di masa pacdaran, bukan hanya terjadi dalam perkawinan,' katanya. "(Paragraf 14)

"Meski prihatin melihat banyak kolega wanita di parlemen yang memilih hidup nyaman mengikuti keinginan elite partai, Eva tetap menaruh harapan besar. 'Wanita yang menjadi pembangun sel tidur harus makin banyak. Lebih bagus lagi kalau wanita dapat mengisi kuota kursi di parlemen, dan bergerak semua. Jumlah 30% pasti lebih berhasil ketimbang 18%, 'katanya. "(Paragraf 19). "Ani menyadari, keberadaan wanita di DPR tak tergantikan, meski seandainya makin banyak pria yang berperspektif gender.' Tak semua masalah bisa selesai dengan baik, sebagus apa pun perspektif gender yang dimiliki pria. Ada 3 kebijakan public yang hanya bisa sempurna bila melibatkan perspektif dan peran wanita di dalamnya,' katanya. Pertama, kebijakan public dengan wanita sebagai subjek, misal kesehatan reproduksi, kebijakan yang mengatur tubuh wanita dan seksualitas wanita, seperti keluarga berencana dan pornografi. Paragraf 21 "Kedua, kebijakan yang mengatur relasi antara pria dan wanita. Misalnya, UU Perkawinan, kawin siri, dan pornografi. (Paragraf 20)

Paragraf 22 baris ke 1 "Ketiga, kebijakan yang netral-gender, tapi high-politics. Seperti politik luar negeri, keamanan, perdagangan internasional, dan makro ekonomi. Paragraf 22 baris ke 4 "Eva bisa memberikan contoh untuk kasus perbatasan wilayah Negara. 'Tak banyak pria yang menyadari, wanitalah yang paling sengsara wanitalah

yang paling sengsara dalam hal konflik perbatasan: diperkosa oleh warga Negara tetangga, dibelit kemiskinan kronis, dan berjuang sendirian melindungi anak-anaknya,’ paparnya. Kebijakan yang low politics, seperti pendidikan dan kesehatan, agar tidak bias, perspektif gender pun harus masuk. ‘Sehingga, respon yang diambil bisa memenuhi kepentingan banyak kalangan, ‘tambahan Ani.”

b. Bentuk Kalimat

Kalimat aktif yang diceritakan oleh narasumber mengenai wanita, paragraf 8 Eva Kusuma Sundar. *“Karena kelemahan itu pula, wanita legislator pun belum tentu menyuarakan isu-siu wanita. Jujur saja, banyak wanita di DPR, yang sosoknya saja wanita, tetapi pemikirannya malah patriarkit, ‘ujurnya”.* Ani Soetjipto paragraf 9 *“.....‘saya melihat, sebabnya antara lain karena 90% anggota DPR sekarang adalah wajah baru, belum memiliki rekam jejak sebagai tokoh politik formal’. Ungkapnya. Wajah-wajahbaru ini –baik wanita maupun pria—ada yang dating dari kalangan selebritis, dinasti politik yang sudah eksis, dan pengusaha. ‘yang benar-benar dari kader partai hanya hanya sebagian kecil, ‘papar ani. Karenanya, mereka tidak mudah beradaptasi. ‘Kalau diseriusi, pekerjaan sebagai anggota DPR itu jauh dari mudah,’ tambahnya”*

Paragraf 20, *“Ani menyadari, keberadaan wanita di DPR tak tergantikan, meski seandainya makin banyak pria yang berperspektif gender.’ Tak semua masalah bisa selesai dengan baik, sebagus apa pun perspektif gender yang dimiliki pria. Ada 3 kebijakan public yang hanya bisa sempurna bila melibatkan perspektif dan peran wanita di dalamnya,’ katanya. Pertama, kebijakan public dengan wanita sebagai subjek, misal*

kesehatan reproduksi, kebijakan yang mengatur tubuh wanita dan seksualitas wanita, seperti keluarga berencana dan pornografi. Paragraf 21 “Kedua, kebijakan yang mengatur relasi antara pria dan wanita. Misalnya, UU Perkawinan, kawin siri, dan pornografi”.

Berbicara mengenai legislator, *“Agar tidak menjadi sekedar hiasan, menurut eva, legislator harus punya kemampuan bicara. ‘Wakil rakyat yang tidak bisa bicara, keberadaannya tidak member efek,; katanya. Tapi, bukan pula berarti tong kosong nyaring bunyinya. ‘Mengisi kepala dengan pengetahuan dan mendalami persoalan di lapangan sangat diperlukan, sebelum bicara di forum maupun di media massa’. Katanya. Untuk keperluan ini, Eva rutin turun kepada konstituen (masyarakat pemilih)-nya dan berdiskusi dengan LSM. ‘Dari salah satu diskusi seperti itulah, saya baru mengerti, kekerasan domestic ternyata bisa juga terjadi di masa pacdaran, bukan hanya terjadi dalam perkawinan,’ katanya”.*

Paragraf berikutnya menceritakan partai politik, *“Ringkasanya, kata Ani, partai tidak mau repot. Lebih mudah buat mereka untuk mencalonkan anak, istri, keponakan, teman-teman, atau figur terkenal atau figur yang berkantong tebal, ketimbang sibuk menjaring calon yang kredibel. ‘Padahal, calon yang mereka usung itu justru belum tahu persoalannya riil masyarakat. Mereka juga tak punya dukungan yang mengakar. Berpolitik cara instan ini membuat banyak dari mereka sekedar menjadi hiasan di parlemen”.* Bantuk kalimat yang menceritakan pria, *“Politikus pria boleh saja fasih bicara soal HAM, tetapi pada praktiknya, mereka sering lupa kesetaraan. Budaya kita sangat patriarkat..... tak jarang, ketika ia menyuarakan hak wanita, Eva menerima komentar bernada seksis....”.*

c. Kata Ganti

kata mereka masih digunakan untuk kata wanita legislator paragraf 5 baris 4 “*Kini, sudah setengah tahun mereka berkantor di senayan. Tapi, suara publik masih menganggap wanita legislator kurang memberi greget. Mereka dipandang tak mampu bersaing dengan pria. Untuk gampangnya, nama-nama pria lah yang mendominasi pemberitaan media, terutama ketika rame-rame soal Pansus Century, walaupun ada, hanya terselip satu dua orang wanita saja*”.

Selain itu kata mereka juga digunakan didalam menceritakan pengurus partai, paragraf 12 baris ke 3 “*Ani menyoroti lemahnya mekanisme internal dari partai politik dalam menjaring kader wanita. ‘Mereka mau gampang saja, memilih siapa saja, yang penting lolos verifikasi KPU dan bisa ikut pemilu. Jarang ada pertimbangan, si calon ini merepresentasikan siapa? Akan member manfaat apa kepada partai dan konstituen, bila dia terpilih?’ papar Ani*”. Disambung pada paragraf 13 “*Ringkasanya, kata Ani, partai tidak mau repot. Lebih mudah buat mereka untuk mencalonkan anak, istri, keponakan, teman-teman, atau figur terkenal atau figur yang berkantong tebal, ketimbang sibuk menjaring calon yang kredibel. ‘Padahal, calon yang mereka usung itu justru belum tahu persoalannya riil masyarakat. Mereka juga tak punya dukungan yang mengakar. Berpolitik cara instan ini membuat banyak dari mereka sekedar menjadi hiasan di parlemen*”.

5. stilistik

Stilistik merupakan bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita

a. Leksikon

Pemilihan kata pengganti yang dilakukan oleh wartawan, seperti kata mitos pada paragraf 2 baris ke 2 *“Bagaimana dengan Indonesia? Meski masih ada yang percaya mitos –bahwa politik adalah urusan pria—wanita mulai eksis di dunia politik, yang kata sebagian orang bisa sangat kejam ini. Pemilu 2004 yang memilih langsung DPR, bisa dijadikan contoh. Wanita yang lolos ke Senayan naik menjadi 18% dari periode sebelumnya (2004-2009) yang sebesar 11,8%. Apakah kenaikan jumlah ini sudah ada efeknya bagi kehidupan kita?”*.

Paragraf 5 kata greget baris ke 4 dan juga kata rame-rame baris ke 8 *“Kini, sudah setengah tahun mereka berkantor di senayan. Tapi, suara publik masih menganggap wanita legislator kurang memberi greget. Mereka dipandang tak mampu bersaing dengan pria. Untuk gampangnya, nama-nama pria lah yang mendominasi pemberitaan media, terutama ketika rame-rame soal Pansusu Century, walaupun ada, hanya terselip satu dua orang wanita saja”*.

Paragraf 18 baris ke 6 kata bawel *“Agar eksis di lingkungan pria, menurut Eva, wanita politikus harus berani melawan mitos. Misalnya, mitos bahwa wanita harus selalu bersikap lemah lembut, dan mitos bahwa wanita yang menanyakan haknya berarti bawel atau kelewat ambisius. Begitu saya tahu hendak disingkirkan, saya melawan. Misalnya, ketika saya sebagai ketua tidak diundang rapat, maka saya tak segan menegur kolega, ceritanya, Eva bertekad akan terus mengganggu zona nyaman pria agar pria tak lagi menganggap wanita sebagai warga kelas dua.*

6. Retoris

Retoris merupakan bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.

a. Grafis

Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar.

Judul	: Dicari Komitmen Wanita Di Politik
Media	: Majalah Femina
Edisi/Bulan/Tahun	: XXXVIII/April/2010
Halaman	: 42
Narasumber	: Yenny Wahid (Direktur The Wahid Institute)

1. Tematik

Dalam tulisan tematik wartawan mencoba memberikan garis besar mengenai bahwa wanita memiliki keperibadian yang mandiri di dalam kepercayaan memimpin suatu tradisi masyarakat Kerajaan. Paragraf 4 dan 5. *“Karenanya, tak mengherankan apabila kepemimpinan wanita di Indonesia memiliki sejarah dan akar budaya yang kokoh dalam tradisi masyarakat Nusantara sejak berabad lampau. Pada abad ke-7, Jawa memiliki Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. Anaknyanya sendiri dihukum potong tangan karena mencuri. Pada masa Majapahit, ada Ratu Tribuwana Tunggaladewi. Ia pemimpin yang adil, berani, berhasil*

memadamkan pemberontakan Sadeng, serta meletakkan pilar-pilar kejayaan Majapahit.” (Paragraf 4). *“Aceh pun terkenal dengan para wanita pemimpin. Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia adalah tiga contohnya. Konteks sejarah kini, kita mencatat Megawati Soekarnoputri sebagai wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai presiden.”* (Paragraf 5)

2. Skematik

Pada awal paragraf wartawan lebih memberatkan penulisan mencoba menarik peran wanita di timur (khususnya Indonesia) dengan wanita barat. Hal ini dijelaskan pada paragraf 1 dan 2, *“Masyarakat timur yang wilayahnya membentang dari anak benua India sampai kepulauan Nusantara berdiri kokoh di atas kultur dan nilai-nilai matriarkat. Karena itu, masyarakat Indonesia menyebut keluhurannya nenek moyang (bukan kakek moyang) dan tanah airnya ibu pertiwi.”* (paragraf 1). *“Berbeda dengan masyarakat Barat yang menganut kultur patriarkat. Kultur di Barat dilestarikan dalam cara pandang oposisi biner (binary opposition). Segala sesuatu dibagi 2 sisi berhadapan: Barat vs Timur, peradaban vs barbarisme, demokrasi vs komunisme, globalisasi vs terorisme, modern vs tradisionalisme, pria vs wanita. Kultur patriarkat menciptakan dominasi dan hegemoni kaum pria atas wanita.”* (Paragraf 2)

Pada pertengahan tulisan, wartawan mencoba menuliskan sejarah panjang tentang peran wanita pada zaman kerajaan, zaman kemerdekaan, hingga zaman panggung politik saat ini. Hal ini dijelaskan pada paragraf 4, 5, dan 6. *“Karenanya, tak mengherankan apabila kepemimpinan wanita di Indonesia memiliki sejarah dan akar budaya yang kokoh dalam tradisi masyarakat Nusantara sejak berabad lampau. Pada abad ke-7, Jawa*

memiliki Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. Anaknya sendiri dihukum potong tangan karena mencuri. Pada masa Majapahit, ada Ratu Tribuwana Tunggaladewi. Ia pemimpin yang adil, berani, berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng, serta meletakkan pilar-pilar kejayaan Majapahit.” (Paragraf 4).

“Aceh pun terkenal dengan para wanita pemimpin. Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia adalah tiga contohnya. Konteks sejarah kini, kita mencatat Megawati Soekarnoputri sebagai wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai presiden.” (Paragraf 5). “memiliki sejarah, terbuka luas peluang bagi wanita Indonesia untuk berkiprah dalam politik. Mengingkatnya jumlah anggota DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, serta eksekutif wanita di jajaran birokrasi pemerintah bisa dilihat sebagai salah satu indikator menggembirakan bagi kemajuan peran wanita Indonesia di bidang politik.” (Paragraf 6)

Sedangkan pada akhir penutup, wartawan mencoba memberikan peran besar wanita didalam kiprahnya berpolitik. Hal ini diuraikan didalam paragraf 10 dan 11 *“Karena itu, dibutuhkan komitmen besar dari wanita untuk terlibat politik. Saya termasuk yang meyakinkan bahwa makin banyak wanita terlibat dalam proses pengambilan keputusan, makin baik perbaikan nasib wanita di Indonesia. Karena, hanya wanitalah yang bisa mengerti kebutuhan wanita.” (Paragraf 10). “Banyak terobosan baru dalam peraturan perundangan di negara kita karena keterlibatan para wanita aktivis. Cuti haid, cuti melahirkan, kuota 30% bagi keterwakilan wanita di DPR, adalah sedikit dari hak wanita yang berhasil diperjuangkan oleh wanita. Sejarah mencatat, wanita-wanita Indonesia memberi kontribusi luar biasa untuk kemajuan negerinya.” (Paragraf 11)*

4. Semantik

.....

a. Latar

Dalam artikel kali ini, latar yang ditampilkan wartawan sangat menonjol ketika dibawah judul bertuliskan *“Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga terkenal sebagai pemimpin jujur, tegas, dan adil. Anaknya dihukum potong tangan karena mencuri”*. Hal ini yang ingin dijelaskan kepada pembaca bahwa wanita juga memiliki keberanian dan kebijaksanaan didalam memimpin sebuah pemerintahan. Hal ini terbukti dari sikap yang dilakukan oleh Ratu Sima.

b. Detail

Secara detail wartawan mencoba mengangkat peran narasumber sebagai seorang yang berperan didalam setiap keberhasilan berpolitiknya. Hal ini diuraikan pada akhir paragraf 11 *“Banyak terobosan baru dalam peraturan perundangan di negara kita karena keterlibatan para wanita aktivis. Cuti haid, cuti melahirkan, kuota 30% bagi keterwakilan wanita di DPR, adalah sedikit dari hak wanita yang berhasil diperjuangkan oleh wanita. Sejarah mencatat, wanita-wanita Indonesia memberi kontribusi luar biasa untuk kemajuan negerinya.”*

c. Maksud

Dalam elemen maksud, ada pesan kepada pembaca bahwa apa yang dilakukan narasumber telah sesuai dengan komitmen wanita berpolitik. Hal ini diuraikan pada paragraf 10 *“Karena itu, dibutuhkan komitmen besar dari wanita untuk terlibat politik.”*

Saya termasuk yang meyakinkan bahwa makin banyak wanita terlibat dalam proses pengambilan keputusan, makin baik perbaikan nasib wanita di Indonesia. Karena, hanya wanitalah yang bisa mengerti kebutuhan wanita.”

4. Sintaksis

.....

a. Koherensi

Dalam elemen maksud, ada pesan kepada pembaca bahwa apa yang dilakukan narasumber telah sesuai dengan komitmen wanita berpolitik. Hal ini diuraikan pada paragraf 10 *“Karena itu, dibutuhkan komitmen besar dari wanita untuk terlibat politik. Saya termasuk yang meyakinkan bahwa makin banyak wanita terlibat dalam proses pengambilan keputusan, makin baik perbaikan nasib wanita di Indonesia. Karena, hanya wanitalah yang bisa mengerti kebutuhan wanita.”*

b. Bentuk Kalimat

Pada bentuk kalimat, narasumber mencoba menjelaskan peran Ratu Sima (Raja Kerajaan Kalingga), Ratu Tribuwana Tungadewi (Pemimpin di masa Kerajaan Majapahit), Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia (Tokah Pahlawan Wanita masa kemerdekaan), Megawati Soekarnoputri (Presiden Wanita Pertama Indonesia). Hal ini diuraikan pada paragraf 4 dan 5.

“Karenanya, tak mengherankan apabila kepemimpinan wanita di Indonesia memiliki sejarah dan akar budaya yang kokoh dalam tradisi masyarakat Nusantara sejak berabad lampau. Pada abad ke-7, Jawa memiliki Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ratu Sima

terkenal sebagai pemimpin yang jujur, tegas, dan adil. Anaknya sendiri dihukum potong tangan karena mencuri. Pada masa Majapahit, ada Ratu Tribuwana Tungadewi. Ia pemimpin yang adil, berani, berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng, serta meletakkan pilar-pilar kejayaan Majapahit.” (Paragraf 4).

“Aceh pun terkenal dengan para wanita pemimpin. Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia adalah tiga contohnya. Konteks sejarah kini, kita mencatat Megawati Soekarnoputri sebagai wanita Indonesia pertama yang menjabat sebagai presiden.” (Paragraf 5).

c. Kata Ganti

.....

.....

5. Stalistik

.....

a. Leksikon

Di dalam pemilihan kata pengganti, diuraikan pada paragraf 2 “Berbeda dengan masyarakat Barat yang menganut kultur patriarkat. Kultur di Barat dilestarikan dalam cara pandang oposisi biner (*binary opposition*). Segala sesuatu dibagi 2 sisi berhadapan: Barat vs Timur, peradaban vs barbarisme, demokrasi vs komunisme, globalisasi vs terorisme, modern vs tradisionalisme, pria vs wanita. Kultur patriarkat menciptakan dominasi dan hegemoni kaum pria atas wanita.” Kata gantinya yang dituliskan adalah Barat (yang mewakili masyarakat Eropa, Amerika), Timur (mewakili masyarakat Asia).

Peradaban (...), Barbarisme (....). Demokrasi (..), Komunisme (..). Globalisasi (..), Terorisme (..). Modern (..), Tradisionalisme (..).

6. Retoris

.....

a. Grafis

Dalam grafis pada teks ini ini kata yang ditulis besar, kutip, dan dicetak tebal hitam sebagai suatu hal yang dianggap penting. Pada paragraf 1 baris ke 6 dan 7 kata ‘nenek moyong’ dan ‘ibu pertiwi’. Selain itu, paragraf 4 dan 5 yang dicetak tebal nama Ratu Sima (Raja Kerajaan Kalingga), Ratu Tribuwana Tungadewi (Pemimpin di masa Kerajaan Majapahit), Panglima Laksamana Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien, dan Cut Meutia (Tokah Pahlawan Wanita masa kemerdekaan), Megawati Soekarnoputri (Presiden Wanita Pertama Indonesia).

b. Metafora

“Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga terkenal sebagai pemimpin jujur, tegas, dan adil. Anaknya dihukum potong tangan karena mencuri.”, kata ini ditulis sebagai petunjuk utama suatu teks. Hal ini digunakan untuk memperkuat pesan utama.

4.4 Hasil Temuan Perbedaan Teks Majalah Figur dan Femina

NO	TEKS MAJALAH FIGUR	TEKS MAJALAH FEMINA
1.	Menggunakan kata perempuan	Menggunakan kata wanita
2.	Menggunakan kata laki-laki	Menggunakan kata pria
3.	Kata Figur menggunakan huruf kapital semua	Kata Femina seperti biasa lazimnya digunakan
4.	Dalam artikel penulisan, wartawan menggunakan inisial penulis	Dalam artikel penulisan, wartawan menggunakan nama lengkap
5.	Bahasa kutipan hanya yang terpenting tanpa hadir kata saya (orang ke dua)	Bahasa kutipan banyak menggunakan kata saya (orang pertama)
6.	Tidak ada anak judul judul pada tulisan utama	Hadir judul kecil pada tulisan utama
7.	Nama rubrik artikel 'Isu Utama'	Nama rubrik utama 'Liputan Khusus'
8.	Pembicara pengamat dan orang yang berkompeten di komisi perempuan (komisi VIII)	Pembicara pengamat dan orang diluar pengamat komisi perempuan
9.	Bahasa terlihat lebih tajam dalam penulisannya	Bahasa lebih ringan disesuaikan dengan pembaca majalah
10.	Kata bahasa Inggris tidak diberi penjelasan dalam tanda kurung	Kata bahasa Inggris diberi penjelasan dalam tanda kurung
11.	Jumlah halaman efektif dengan 1200 karakter untuk dua halaman	Jumlah halaman agak diperlebar dengan 1200 karakter untuk empat halaman
12.	Segmentasi pembaca lebih dominan laki-laki	Segmentasi pembaca lebih dominan perempuan.
13.	Majalah terbit sebulan sekali	Majalah terbit sebulan dua kali

4.5 Proses Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data wawancara, penulis mencoba meminta keterangan langsung kepada dua narasumber yang mempunyai kepentingan didalam penelitian penulis. Pertama dilakukan kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Jawa Timur yaitu Prof.Dr.Dra.Hj. Istibsjaroh,SH,MA yang dilakukan di ruangan tamu beliau. Yang kedua Dedi Irawan, S.IP,M.Si pimpinan redaksi Majalah Figur yang ditemui diruangan beliau di Majalah Figur

4.5.1 Wawancara Pertama

Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, SH, MA

Anggota DPD/MPR RI Jawa Timur

Wawancara by Voice Recorder

Rabu (5/10/2011)

Bagaimana ibu melihat perjalanan politik perempuan di DPR, DPD, maupun DPD ?

Dalam undang-undang disebutkan tentang 30 persen keterwakilan perempuan, ternyata itu ada permasalahan didalamnya. Salah satu kendalanya adalah permasalahan SDM

(sumber daya manusia), selain itu terkadang ada juga lelaki yang responsif gender dan ada juga yang tidak. Pemikiran dasar mereka menganggap bahwa gender itu sebuah seks. Sebetulnya laki-laki juga bisa dibilang gender. Lalu persoalan berikutnya mengenai politik perempuan adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap suara perempuan. Selain itu terkadang partai menempatkan perempuan pada nomor urut besar seperti No. 3 keatas. Selain itu ada lagi judicial review yang tidak melihat suara terbanyak akhirnya yang menjadi korban adalah perempuan. Terlebih perempuan lebih bermain bersih tanpa ada “politik uang”, hal ini didasarkan pertimbangan hati nurani perempuan. Ada lagi persoalan dominan didalam keluarga yang mengatakan “saya saja yang maju jadi caleg, jangan kamu” hal-hal seperti ini lah yang membuat perempuan mundur untuk berperan aktif maju menjadi politisi di legislatif. Tetapi ada juga laki-laki yang memberikan kebebasan berpolitik pada istrinya dengan syarat harus tetap memperhatikan kondisi keluarga dirumah. Belum sampainya kuota yang diinginkan karena kurangnya sumber daya manusia yang tersedia untuk aktif didalam partai.

Bagaimana dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan?

Sebenarnya angka 30 persen itu awalnya dibentuk sebuah keterwakilan partai terhadap perempuan, tetapi fakta dilapangan bahwa laki-laki juga merasa keberatan dengan angka 30 persen ini. Indikasi persoalan ini terlihat dari no urut yang diberikan partai, laki-laki lebih dominan berada di angka urutan pertama. Persoalan kedua hadirnya undang-undang judicial review MK memaksa adanya suara terbanyak. Yang dimaksud banyak disini adalah jumlah suara laki-laki lebih dominan. Laki-laki itu mau korban uang, sedangkan perempuan dari mana ia bisa mendapatkan uang. Pengalaman yang ada juga melihat adanya keberanian calon partai laki-laki untuk rela tidur di tempat hasil akhir

penghitungan suara agar suaranya tidak hilang. Kalau perempuan sulit untuk melakukan itu

Bagaimana dengan suara pemilih ibu kala itu?

Alhamdulillah saya mendapat suara terbanyak, kalau di hitung keseluruhan Dapil (Daerah Pemilihan). Saya perwakilan Jawa Timur kedua, sedangkan pertama Ella perwakilan daerah Jawa Barat. Pemilih saya kurang lebih hampir dua juta pemilih yang mempercayakan saya untuk duduk di DPD

Berhubung tesis ibu terkait gender, bagaimana dengan aliran yang ada di Indonesia terkait Feminis Liberal, Marxis, Sosialis. Dari beberapa aliran ini yang mana cocok dengan jiwa Indonesia?

Ada pendapat yang mengatakan bila anda seorang feminis sejati anda tak boleh menikah, menikah hanya membuat anda menjadi “pesuruh” laki-laki, itu teori feminis barat. Ada anggapan ketika seorang perempuan belum menikah itu belum subordinasi, tetapi kenapa setelah menikah menjadi subordinasi dari suaminya, kalau begitu berarti perempuan tidak usah untuk menikah cukup melakukan ‘lesbi’ ini teori yang dijadikan pegangan feminis radikal. Makah al inilah yang ditentang oleh Islam, di barat kegiatan ini ada, tetapi ditutup secara rapat. Sedangkan feminis liberal mempunyai pemikiran yang tidak sama persis dengan laki-laki tetapi kedudukannya sama didalam hak kebebasan sebagai warga negara. Feminis sosial yang saya pahami bahwa perempuan harus membantu laki-laki juga untuk bisa bekerja, lalu Marxis karena pemahaman agamanya kurang, mereka menjalankannya ‘semau dia’. Kalau diistilahkan untuk gerakan feminis di Indonesia seperti “burung dara” kalau mereka mempunyai anak, yang ibu menunggu dirumah bila bapak mencari makan

atau nafkah keluarga, ini lah yang cocok model di Indonesia. Makanya dalam hadist Al-quran dinyatakan semua harus dimusyawarahkan, jadi suami istri bisa diajak musyawarah bila saling menghargai satu sama lainnya.

Bagaimana tanggapan ibu terkait tayangan media yang seakan merendahkan wanita dengan berpakaian seksi untuk menarik penonton televisi?

Seharusnya masyarakat sendiri yang melihat fenomena ini cocok atau tidak terhadap peradaban bangsa kita. Kalau memang kurang baik, pribadi saya mempunyai kecenderungan untuk mengganti channel yang lebih baik. Terkadang saya senang melihat yang laki-laki berpakaian jas berdasi, tetapi yang perempuan tangganya terbuka, pusernya kemana-mana. Kalau masyarakatnya sudah agamis sulit untuk melihat cara berpakaian seperti itu. Jangan hanya kepentingan rating moral bangsa dihancurkan melalui tayangan yang kurang memberikan sebuah pencerahan bangsa di era modernisasi ini dilihat dari sudut pandang kacamata agama. Kalau dilihat dari kacamata budaya, persoalan ini juga bisa membahayakan pribadi seseorang yang kalau tiba-tiba laki-laki terangsang dan lari ke istrinya itu ga apa. Tetapi kalau sampai ke orang lain ini yang bahaya.

Bagaimana dengan isi Desertasi ibu terkait gender, bisa diceritakan untuk dibagi pengalaman dengan tesis saya?

Ditulsikan didalam desertasi tersebut berisi tentang hak perempuan itu apa saja, ayatnya bagaimana kita bandingkan ayat yang penafsiran terdahulu dengan yang saat ini *arijalu kowamu al nissa* seorang laki-laki harus bertanggungjawab terhadap perempuan *bima fadulloh* mendapatkan keutamaan. Jadi laki-laki mendapatkan keutamaan didalam bertanggungjawab terhadap perempuan, dari pemberian nafkah hingga perlindungan

terhadap wanita (itu tafsir yang lama). Tetepi belakangan *arijalu* tidak hanya pada laki-laki bisa juga perempuan yang *rojula*, perempuan yang menggantikan peran laki-laki karena alasan hilang pekerjaan atau sakit yang tak kunjung baik. Itu semua bisa digantikan perannya oleh perempuan, perempuanlah yang mendapatkan takdir tersebut, sehingga inilah perbedaan penafsiran yang dikaji. Memang zaman dahulu perempuan ikut apa kata laki-laki, sekarang lain orang perempuan bisa bekerja bila mempunyai kemampuan. Penafsir yang lama tidak salah dan yang baru juga tidak salah karena situasi dan kondisinya. Karena harapannya tercapai didalam menjalin bahtra rumah tangga yang *sakidah warohmah* untuk ketentraman didalam keluarga.

Tadi yang ibu ceritakan adalah sebuah perjuangan feminis Islam, bagaimana dengan ibu sebagai feminis politik di DPD (Dewan Perwakilan Daerah)?

Politik itu sesuatu amanah kekuasaan, jadi pengabdian yang harus saya lakukan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk kemajuan wilayah pemilihan saya Jawa Timur, walau semua daerah juga harus di maukan bersama-sama. Kekuasaan ini semesta harus kita kembalikan kepada yang memberi kekuasaan ini

Kesimpulannya bu?

Gender itu laki-laki dan perempuan konstruk budaya, kalau seks perempuan dan laki-laki itu sudah ada kodratnya jadi itu harus dibedakan. Kalau kita berbicara mengenai gender berarti kita membicarakan permasalahan laki-laki dan perempuan. Bagaimana harus ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa berjalan bersama memecahkan masalah yang ada untuk kebaikan perempuan dan laki-laki itu sendiri.

4.5.2 Analisa Wawancara

4.5.3 Wawancara Kedua

Dedi Irawan, S.IP, M.Si

Pemimpin Redaksi Majalah Figur dan Kajur FISIP UNAS

Wawancara by Voice Recorder

Jumat (8/10/2011)

Saat terjadi musibah lumpur lapindo ada dua media yang agak bersebrangan memberikan informasi kepada masyarakat, media TvOne lebih cenderung memberitakan tentang warga yang sudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan Metrotv lebih mempersoalkan nasib warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Ternyata dibalik ini semua ada kepentingan pemilik media. Pertanyaannya, apakah media Majalah Figur juga sama membela kepentingan pemiliknya, untuk memuluskan jalan pemilik media saat pemilu lalu?

Pertanyaan ini terkait dengan visi dan misi Majalah Figur, sebenarnya sejak awal penerbitan ini sebuah media yang tadi awal pemikiran digunakan sebagai media sosialisasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pendirinya Agun Gunanjar Sudarsa anggota Fraksi Golkar Daerah pemilihan Jawa Barat sekaligus sebagai anggota komisi III DPR RI, jadi kebijakan yang diambil terkait kebijakan personal. Walaupun sebagai anggota Golkar, terkadang kebijakannya diambil berdasarkan nuraninya untuk membela kepentingan rakyat yang benar-benar serius membela kepentingan pro rakyat. Ini sebagai awal pendirian

Majalah Figur, lalu apakah politik keredaksian majalah ini berpihak kepada pemilik? Paling tidak kita melihat media ini adalah media yang menganalisis kebijakan publik. Kalau ada lihat dari penerbitan tahap ke tiga hingga saat ini selalu berbicara tentang kebijakan publik dalam pengertian umum, tidak menyuarakan kepentingan siapapun.

Bagaimana dengan tampilan media ini dalam tampil eksklusif orang perorang di halaman tengah?

Saya pikir sepanjang kepentingan orang per orang itu sama dan pas dengan isi tema yang dibicarakan, sesuai dengan rapat keredaksian yang mau tidak mau membolehkan mengangkat idealisme mereka yang benar mempunyai pemikiran yang bagus. Saat ini saya melihatnya masih didalam koridor itu, tidak berpihak kepada orang per orang apalagi Partai, karenan kita tidak memiliki urusan dengan partai politik. Kita hanya mempunyai urusan menyuarakan kepentingan publik yang mempunyai harapan mencerdaskan pembacanya.

Lalu bagaimana dengan peran Majalah Figur terhadap pemberitaan Perempuan berpolitik didalam edisi April 2010. Berpihak atau justru memarginalkan perempuan? Karena ada beberapa media justru menampilkan perempuan sebagai objek penjualan melalui tampilan marjinal gambarnya.

Kapitalisme belakangan ini lebih melirik kepada simbol-simbol seksual perempuan, itu sebetulnya bukan trend pada masa sekarang. Pada zaman dahu sebelum kita lahir media juga sudah menampilkan hal tersebut, tetapi dengan batasan-batasan yang ada pada saat itu. Kalau kita melihat apakah pada saat sekarang ini yang nanti juga berhubungan dengan Majalah Figur, bahwa posisi Majalah Figur tetap mengupayakan untuk

menyetarakan politik perempuan dan juga perempuan berpolitik itu jelas karena sudah beberapa edisi menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang menurut kita layak dalam penjualan dan layak sebagai substansial bahwa mereka menguasai materi tentang tema yang diangkat. Belakangan eksploitasi tentang perempuan merupakan antitesis dari kepentingan ekonomi liberalisasi bahwa sekelompok feminisme radikal yang menginginkan tidak menginginkan perempuan dieksploitasi seperti itu. Mereka juga merasakan era global yang pada titik tertentu mereka mempunyai kesamaan didalam kebebasan. Tetapi pada titik yang lain mereka bersebrangan antara feminis liberal yang cenderung mengkapitalisasi apapun, tetapi disini yang lain kaum feminis radikal yang liberal pada akhirnya mereka bertemu pada titik yang tidak ketemu. Satu sisi mengatakan kapitalisasi buat mereka sah saja apa yang mereka lakukan masih dibutuhkan manusia didalam eksploitasi. Tetapi feminis radikal tidak, bila ingin mengeksploitasi dengan cara itu salah, eksploitalah pemikiran kami, kemampuan kami. Persoalan yang terjadi di media dengan tampilan perempuan yang dimarginalkan bentuk dari benturan kedua kapitalisasi itu dan akhirnya seperti ini. Dan majalah Figur tidak akan berbenturan dengan hal itu karena kita tidak ingin membuat sebuah opini persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat. Justru Majalah Figur sebaliknya mengangkat harkat perempuan melalui pemberitaannya, bisa dilihat kita memberikan porsi besar kepada perempuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada publik. Justru kita sebagai media yang mendorong penuh kuota 30 persen sebelum banyak media mengangkat hal itu. Karena info ini kita dapat dari pemilik terkait isu ini.

Bila kita bicara tentang kuota 30 persen kuota perempuan di legislatif, maka pokok keadilan yang ada justru 50 berbanding 50 bukan 70 berbanding 30 masalah kuota

yang diberikan dalam undang-undangnya. Justru uniknya dari angka 30 persen tersebut ternyata hanya 11 persen saja perwakilan perempuan di legislatif kemana yang 19 persennya? Apa pendapat bapak terkait persoalan ini.

Kalau kita melihat unsur adil atau tidak sebenarnya bukan dari angka, buat apa angka 50 persen perempuan 50 persen laki-laki, toh kebijakannya hanya untuk kebijakan perempuan saja dan apakah dengan presiden perempuan aspirasi perempuan diperhatikan saya rasa itu juga tidak. Justru banyak kaum perempuan yang terkena pemutusan kerja, proses marginalisasi tetap ada, kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi logikanya kalau dilihat dari angka perangka saya kira bukan itu. Justru lebih baik menggunakan sistem zipper dua satu dua satu sepertiga, kalau sepertiga logikanya pas 30 persen. Pada akhirnya kalau cukup 30 persen wadah politik perempuan lebih efektif. Tetapi kenapa persoalannya 11 persen, persoalannya bukan pada perempuan juga bukan pada persoalan partai. Problemnnya, “maaf” masyarakat kita kurang sungguh-sungguh karena faktor budaya kita yang masih melihat faktor patriarki.

Sudah belum perempuan politik hadir didalam menjalankan aspirasi masyarakat yang medukungnya?

Jawabannya belum, dari representasi 11 persen perempuan yang ada diperlemen kita masih merasa berat untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, lebih penting bagaimana kaum perempuan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada, artinya kita jangan bicara di kelompok legislatif. Lebih penting adalah di kelompok eksekutif, seberapa banyak dirjen di pemerintah diisi oleh perempuan. Memang semua rumusan berada di perempuan kementerian-kementerian ini yang menggodok, bila ini diseriuskan bisa membantu

perempuan didalam menjalankan budayanya seperti enggan untuk mudah disuap. Jadi saya mempunyai ide bagaimana angka 30 persen itu bukan hanya ada pada lembaga parlemen tetapi juga pada lembaga kementrian. Cobalah cari dirjen didalam kementrian dalam negeri harus dirumuskan juga masuknya kuota 30 persen perempuan dan tidak semuanya laki-laki. Karena kalau hanya mengandalkan suara di parlemen nampaknya akan berat karena adanya peruan undang-undang yang dibaut oleh pemerintah. Kalau hal ini bisa dilakukan secara optimistis bahwa aspirasi kaum perempuan sebenarnya bukan semata-mata ini dikaitkan dengan pro atau tidak mereka pro terhadap kaum perempuan tetapi yang mendasar lagi, apakah dari representasi mereka ada sebuah kebijakan yang nuansanya begitu humanist, begitu sangat egaliter karena selama ini perempuan diposisikan sebagai orang yang harmoni, egalitarian, tidak memaksakan kehendak kalau wajah undang-undang kita seperti itu, saya kira cukup bagus dan itu bisa kita lakukan posisi sejajar antara perempuan. Kalau artikuasi dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mungkin sudah cukup banyak, tetapi untuk tingkat pemerintah masih belum banyak.

Lalu bagaimana dengan fenomena bermunculannya artis perempuan dikancah politik, disatu pihak patai memanfaatkan mereka untuk kepentingan mendulang suara. Tetapi justru setelah mereka lolos ke parlemen sampai saat ini aspirasi mereka tak terdengar. Dalam hal ini siapa yang bertanggungjawab atas persoalan ini, si artis atau partai?

Dalam hal ini ada perkawinan diantara keduanya yang pertama jelas ada kepentingan partai, kedua ada kepentingan artikulasi sarana tansi dari artis tersebut, artis tersebut memanfaatkan kepopuleritasannya untuk terjun ke dunia politik tanpa mereka membekali pada awalnya tentang aktifitas politik lalu politik sebagai sebuah pemahaman. Mereka

bukan orang yang masih butuh belajar terhadap politik analisis disetiap masalah. Tetapi kalau ini dibatasi tidak benar juga mereka tidak boleh, namun saya meresa mereka juga harus fair sebagai anggota dewan itu didongkrak popularitas seharusnya mereka juga sadar. Bahwa popularitas menjual mereka sehingga mereka membeli seharusnya mereka lebih menggigit dari pada anggota dewan lainnya. Karena anggota yang lain terpilih karena perjuangan yang ekstra keras. Beda dengan para artis yang sudah secara sendirinya otomatis mereka populer, ini yang harus mereka bekerja ekstra lebih keras memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya partai harus membuat batasan-batasan bukan semata demi sebuah kursi tetapi apakah orang ini mempunyai kapasitas atau tidak. Kalau tidak sayang sekali artis yang terpilih justru dianggap gagal karena tidak sekali suara mereka terdengar di parlemen dan tak terdengar isi statement mereka saat bicara kepada publik untuk menampilkan sesuatu. Kalau Rieke Diah Pitaoka, Nurul Arifin mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kapasitas yang memadai. Jadi ini bukan salah artisnya juga, tetapi si artis diminta berkaca diri atas kapasitas serta kemampuannya berjuang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berarti harus ada kaderisi sebelumnya, pilih berpolitik atau menjadi artis?

Memang masing-masing partai mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pendidikan calon anggota legislatif dari sebuah partai. Seperti halnya Golkar mempunyai loyalitas pengkaderannya cukup baik, mereka secara serta merta lebih baik dibandingkan dengan partai Demokrat. Pengkaderan mereka lebih terjaga dan mempunyai kualitas. Kaderisi yang begitu panjang melalui tahapan yang berjenjang dan penilaian tersendiri. Sedangkan yang terjadi pada Demokrat ini sebuah berkah dari kepemimpinan SBY, tampilnya SBY siapapun akan terkena imbas terpuh menjadi pilihan publik yang loyalitas terhadap sosok

SBY. Lah inilah sebuah fenomena perekrutan partai yang kebanyakan mempunyai kelemahan diawal.

Bila kita melihat fenomena trend perempuan berpolitik, disana ada peningkatan angka dari tahun 2004 ke 2009. Apakah trend peningkatan ini juga akan terjadi ditahun 2014 nanti?

Saya melihat pada tahun 2014 trendnya akan meningkat, kenapa? Ini sejalan dengan data statistik populasi masyarakat kita sebagai pemilih, bahwa kelompok perempuan secara radikal dari tahun ketahun meningkat 5 persen. Hal ini bila terjadi selama pemilihan lima tahun sekali berarti ada peningkatan hampir 25 persen jumlah penduduk populasinya, ini juga ada kemungkinan pemilih perempuan memilih perempuan. Apalagi orang itu cukup terkenal, saya tetap optimistis bahwa kaum perempuan ini akan meningkat pada tahun yang akan datang ditambah lagi track record dari politisi perempuan bermasalah itu hampir tidak ada, kecuali Angelina Sondaq yang masih menjadi tersangka. Tetapi tidak sebanyak kaum laki-laki, sehingga ini alasan mengapa pemilih mempercayakan suaranya kepada perempuan.

Pertanyaan terakhir, bagaimana solusi bapak sebagai pengamat media politik agar partai bisa mendapatkan calon legislatif perempuan yang berkualitas?

Pertama proses rekrutmen jangan semata-mata karena penampilan eksploitasi mereka karena cantik, memiliki kekayaan, jangan ini yang dilihat. Populeritas boleh saja, tetapi mereka juga harus mempunyai kualitas dan kemampuan didalam bekerja sehingga mampu berdiskusi dengan baik kepada masyarakat luas akan problem mereka lalu menyampaikannya kepada publik. Lalu perhatikan ukuran loyalitas mereka terhadap

partai dan publik dalam proses rekrutmen calon anggota dewan yang kebetulan perempuan berwawasan luas. Selain itu stop unsur-unsur mereka berasal dari keluarga apa, berapa kekayaannya gunakan cara proporsional dan profesional. Lalu partai juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara bijak, artinya tampilkanlah dari mulai sekarang sosok perempuan yang bisa terjuan kemasyarakat langsung tanpa harus media mengeksploitasi mereka secara berlebihan. Kalau hal ini dilakukan secara terus menerus media juga akan sendirinya mempopuleritakan sosok yang benar-benar serius berjuang untuk rakyat.

4.5.4 Analisis Wawancara

4.5 Analisis Kontek Sosial